

**KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM PEMENANGAN SYAHRUL YASIN LIMPO
(SYL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2013 DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN
GOWA**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik

Oleh :

AKBAR CANDRA

E 111 08 257

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2014

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM PEMENANGAN SYAHRUL
YASIN LIMPO (SYL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2013 DAERAH
PEMILIHAN KABUPATEN GOWA**

Nama Mahasiswa : AKBAR CANDRA
Nomor Pokok : E 111 08 257
Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Politik

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada
program studi Ilmu Politik, jurusan Politik Pemerintahan

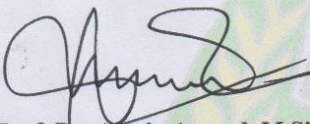
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

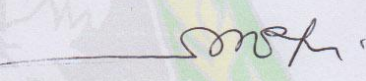
Makassar, Mei 2014

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

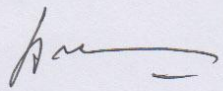

Prof. Dr. Armin Arsvad, M.Si.
NIP: 19651109199103 1 008

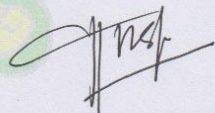

A. Naharuddin, S.Ip, M.Si
NIP: 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Politik dan
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Program Studi
Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Hasanuddin**


Dr. H. A. Gau Kadir, MA
NIP: 19501017 198003 1 002


Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si
NIP: 19730813 199803 2 001

HALAMAN PENERIMAAN

**“KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM PEMENANGAN SYAHRUL
YASIN LIMPO (SYL) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 2013 DAERAH
PEMILIHAN KABUPATEN GOWA”**

Nama Mahasiswa : AKBAR CANDRA

Nomor Pokok : E 111 08 257

Jurusan : Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Politik

Telah diterima dan disetujui oleh Panitia Ujian Sarjana
Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik Jurusan Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, Mei 2014

Panitia Ujian Sarjana

Ketua : Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.

(.....)

Sekretaris : Ali Armunanto, S.IP, M.Si

(.....)

Anggota : A. Naharuddin, S.IP, M.Si

(.....)

Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

(.....)

Ariana Yunus, S.IP, M.Si

(.....)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat Hidayah-Nyalah yang senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana program studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah kebenaran subyektif bagi diri penulis. Untuk itu perbedaan pendapat mengenai kandungan skripsi ini adalah hal yang wajar, justru yang menjadi tugas kita semua adalah berusaha mengkaji kembali sehingga kebenaran hakiki dapat kita peroleh.

Penulis juga menyadari bahwa untuk saat ini, mungkin inilah hasil maksimal yang dapat disumbangkan yang senantiasa menyisipkan kekurangan dan kelemahan, sehingga untuk hal inipun penulis selalu menyediakan ruang untuk menampung kritik dan saran dari semua pihak demi pencapaian kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta bapak Chandra Dewa dan ibu Nurbaya Candra yang telah banyak memberi kasih sayang, serta dukungan baik moril maupun materil, nasehat, dan doa sehingga perkuliahan dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik, hingga kapanpun penulis

tidak bisa membalasnya. Kalian adalah bagian terpenting dalam seluruh episode perjalanan hidup penulis. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si selaku pembimbing I sekaligus sebagai penasehat akademik penulis dan Andi Naharuddin, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing II dan sekretaris jurusan atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. DR. Idrus Paturusi, Sp. B, Sp BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. H. Hamka Naping, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. H. A. Gau Kadir, M.A selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, serta Andi Naharuddin. S.IP, M.Si selaku sekretaris jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan;
4. Dr. Gustiana A.Kambo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik;
5. Bapak-bapak/Ibu-ibu Staf pengajar, Dr. Muhammad Al Hamid, A. Ali Armunanto S.Ip, M.Si, Drs. H. A. Yakub M.Si, Bu Ariana, Pak Syahrir, Pak Sukri, Prof. Kausar, Drs. Muhammad Saad, M.Si, terima kasih atas semua kuliah-kuliah yang inspiratif dan akan mewarnai babakan kehidupan penulis selanjutnya, serta staf akademik Fisip Unhas, Kak Irma, Bu Hasna, Bu Nanna. Terima kasih atas semua bantuannya;

6. Seluruh guru yang dengan tulus memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Keluarga besar Demokratis 08; Noel, kanda Ria, Titonk, Jengbess, Yayat, Rembo, Elis, Dian, Ekie, Asma, Iis, Age, Ilyn, Apla, Rendy, Illank, Cakra, Rio, Obi, abang Kerbi, Rahmat, Tazim, Ari, Aswan, Roy, Wandu, Ilo, Indra, Anca, Acca, Akil, Dayat, Arham, Amril, Anto boy, Andy, Ifan, Rullah. Kanda-kanda senior HIMAPOL Fisip Unhas.
8. Kepada teman-teman KKN Gelombang 82 khususnya di desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng; Abang, Gian, kordes dan ishak, banyak tersimpan kenangan-kenangan dengan kalian;
9. Kepada teman-teman alumni SDN Tanggul Patompo II Makassar, SMP Negeri 2 Gowa dan alumni SMA Negeri 2 Sungguminasa, Kab. Gowa. Terima kasih untuk kebaikan luar biasa yang kalian pancarkan untuk penulis.;
10. Bapak-bapak informan Partai Golkar yang telah dengan senang hati membantu penulis selama melakukan penelitian. Serta keluarga besar penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis selalu melambungkan harapan untuk dapat membalas seluruh kebaikan kalian. Semoga saatnya tak lama lagi.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam

memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.

Makassar, Mei 2014

Akbar Candra

ABSTRAK

AKBAR CANDRA, NIM E11108257, dengan judul **“Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo Pada Pemilhan Gubernur Daerah Pemilihan Kab. Gowa”**. Dibawah Bimbingan **Prof. Dr. Armin, M.Si** dan **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**.

Syahrul Yasin Limpo bukan saja menjabat sebagai gubernur melainkan juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Pria kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 ini terpilih secara aklamasi menduduki posisi tersebut lewat forum Musda ke-8 Partai Golkar Sulsel di Makassar. Maju sebagai calon *incumbent*, Syahrul yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan juga sebagai putra daerah. Inilah yang dianggap mendorong masyarakat lokal pada daerah pemilihan kab. Gowa memberi partisipasi serta hak pilihnya cenderung kepada Syahrul Yasin Limpo. Kemampuannya memaksimalkan kapasitas dan kualitas dirinya dalam memimpin Sulsel inilah menjadi ukuran masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Maka penulis tertarik untuk melihat kekuatan politik lokal di kab. Gowa yang menjadi awal terbangunnya karir politik dan birokrasi Syahrul. Terlebih lagi daerah ini dipimpin oleh adik Syahrul, Ichsan Yasin Limpo.

Konsep yang dipakai ialah kekuatan politik dan jenisnya, konsep aktor politik, dan konsep pemelukada. Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis dengan dasar penelitian studi kualitatif. Pengambilan data diperoleh dari hasil pengumpulan data primer dan sekunder dengan wawancara mendalam, dan wawancara terstruktur. Data dari hasil wawancara dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat sesegera mungkin terungkap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan kekuatan politik di kab. Gowa yakni besarnya pengaruh partai Golkar dan partai pengusungnya, birokrasi dan sipil. Selain itu juga, Syahrul sebagai seorang aktor politik menunjukkan figur dengan prestasinya memimpin Sulsel, ini ditandai saat sukses menjabat bupati 2 periode di kab. Gowa. Faktor kemenangan yang paling dominan adalah posisi Syahrul sebagai gubernur. Total 24 kabupaten/kota di Sulsel, di kab. Gowa pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (SAYANG) memperoleh 312.199 atau 80,60 % suara.

ABSTRACT

AKBAR CANDRA, NIM E11108257, titled "**The Power of Local Politics In Syahrul Yasin Limpo Victory In District Electoral District Governor election. Gowa**". Under the guidance of **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** and **Andi Naharuddin, S. IP, M.Si**.

Syahrul Yasin Limpo is not only served as governor but also the head of DPD 1 of the Golkar's Party South. He was born in Makassar, March 16, 1955, was elected to the position unanimously passed 8th Musda forum Golkar's Party in Makassar of South Sulawesi. Forward as a candidate for the incumbent, Syahrul who has the high intellectual ability as well as a native son.

This is considered to encourage local communities to the district electoral areas. Gowa giving participation and voting rights tend to Syahrul Yasin Limpo, his Ability to maximize the capacity and quality of this Sulsel himself in the lead in determining the size of the community becomes its leader. The authors are keen to see local political power in the district. Gowa which is initiated the establishment of syahrul's political and bureaucratic career. Moreover this area was led by his brother, Ichsan Yasin Limpo.

The concept that used is the political power and its type, the concept of political actors, and the concept of election. The author was conducted research with descriptive analysis method on the basis of qualitative research studies. Data collection was obtained from primary and secondary data collection with in-depth interviews, and a structured interview. Data from interviews recorded as accurately as possible and collected.

All the data were analyzed by qualitatively so that what was contained behind reality could be revealed as soon as possible. The results was showed that the support of political forces in the district, the influence of the Golkar party and the party that support him, bureaucracy and civil. In addition, Syahrul as a political actor with his performance figures show the lead of South Sulawesi, this moment marked a successful regent served 2 terms in the district of Gowa. The most dominant factor is a victory Syahrul position as governor. The total of 24 districts / cities in the province of Sulsel, the pair of Yasin Limpo Syahrul-Agus Arifin Nu'mang (DEAR) gained 312 199 or 80.60% of the vote.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Penerimaan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstraksi	vii
Daftar Isi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kekuatan Politik	9
B. Jenis Kekuatan Politik	10
C. Konsep Aktor	29
D. Konsep Pemilukada	31
E. Kerangka Pemikiran	34
F. Skema Kerangka Pemikiran	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Unit Analisis Data	38
B. Tipe dan Dasar Penelitian	38
C. Sumber Data Penelitian	39

D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisa Data	41
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kab. Gowa	44
B. Sumber Daya Manusia Kab. Gowa	51
C. Sosial Ekonomi Kab.Gowa	52
D. Kondisi Politik dan Pemerintahan Kab. Gowa	53
E. Profil Syahrul Yasin Limpo	55
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kekuatan politik yang mendukung kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa.	58
B. Kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo sebagai aktor politik pada pemilihan Gubernur 2013 di kabupaten Gowa.	64
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
 Daftar Pustaka	 76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum daerah atau yang sering disebut dengan Pemilukada adalah bentuk demokrasi yang tampil sejak pertengahan 2005 lalu. Pemilukada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif daerah, mulai dari wali kota, bupati, hingga gubernur. Keterlibatan warga dalam Pemilukada mereka masing-masing sudah tentu memberikan manfaat bagi daerah. Asumsi bahwa mereka yang dipilih, merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih. Sistem pemerintahan demokrasi, pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik.

Pada tahun 2004, Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR telah dipilih langsung oleh rakyat. Begitupun dengan kepala daerah yang dulunya dipilih oleh DPRD, maka sejak tahun 2005 Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ini merupakan salah satu bentuk penyempurnaan dari UU otonomi daerah yang baru, UU No.32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Inilah pencapaian terbaik otonomi daerah, dimana masyarakat langsung dilibatkan untuk memilih pemimpin yang akan memerintah mereka selama pembatasan masa jabatan seorang kepala daerah, yaitu cukup satu periode saja, lima tahun ke depan. Kecuali bagi mereka yang benar-benar menonjol prestasi atau keberhasilannya.

Indonesia yang mengalami Reformasi sejak tahun 1998, pasca turunnya Presiden Soeharto atas tuntutan rakyat, melakukan proses demokratisasi. Proses inilah yang kemudian menghasilkan desain sistem politik yang sangat berbeda dengan desain yang dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau dilakukan secara bertahap telah mengubah landasan berpolitik secara sangat radikal. Desain kelembagaan yang dimaksudkan yakni untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah dengan gagasan utama rakyat ditingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan daerahnya.

Politik lokal yang dipahami sebagai rangkaian proses - proses politik dan demokrasi di daerah mengemuka sudah sejak lama hingga pada akhirnya terbentuk demokrasi di Indonesia, politik lokal yang dinamis makin menonjolkan dirinya pada perhelatan Pemilu. Berbagai sumber daya yang menggiurkan dan munculnya tokoh lokal di daerah (*local strongman*) mendorongnya sebagai bagian kekuatan politik yang mempunyai pengaruh menguatkan relasi politik penguasa di daerah.

Kekuatan politik merupakan aktor politik mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.

Berkaitan halnya dengan pengertian individu, kekuatan politik sebagai lembaga adalah dengan memainkan peranan dalam proses penyelenggarannya, yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Pada pengertian dua hal ini kekuatan politik yang telah sejak lama lahir di Indonesia berkontribusi membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Perkembangan sistem politik telah banyak bermunculan aktor maupun lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor maupun lembaga yang menjelma menjadi kekuatan politik ini tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia.

Pemilukada Sulawesi Selatan dengan nuansa baru politik lokal dan partisipasi masyarakat di daerah, ditandai dengan pelantikan Syahrul Yasin Limpo untuk pertama kali menjadi gubernur pada april 2008, mengawali gaung sejumlah program besar di Sulawesi Selatan. Diantaranya Center Point of Indonesia dibangun, IPDN untuk regional kawasan Indonesia Timur dipusatkan di Makassar ,Program pendidikan gratis menginspirasi nasional, 500 calon doktor diberi beasiswa ke luar negeri, dan pengusaha dimudahkan berinvestasi. Awal kepemimpinannya program-program besar tadi dijadikan landasan tak hanya fisik, tapi membangun peradaban. Kalimat itu yang paling sering di dengungkan Syahrul di awal masa jabatannya. Program pembangunan fisik diikuti pembangunan karakter. Langkah pertama diambil dengan mengubah nama Bandar udara Hasanuddin menjadi Sultan Hasanuddin. Bukan persoalan sebatas nama, upaya itu mengembalikan semangat kepahlawanan, nasionalis, cerminan kultur daerah juga simbol-simbol budaya yang erat di Sulawesi Selatan. Peradaban

pembangunan di era serba modern jadi dasar segala segi kehidupan. Membuat kuat dan hebat. Itu sebabnya mengapa dua program jitu selalu didengungkan bersama wakil gubernur Agus Arifin Nu'mang. Pendidikan gratis serta kesehatan gratis. Dua program yang menyentuh dimensi dasar kehidupan manusia sebagai mahluk dengan jati diri.

Incumbent yang juga sebagai sebagai putra daerah Sulawesi Selatan dari beberapa buku dan biografi yang memuat tentang dirinya, anak kelahiran Makassar, 16 Maret 1955 ini putra dari H.M. Yasin Limpo dan Hj. Nurhayati. Didikan ayah yang berlatar belakang militer ini membawanya tumbuh sebagai pemimpin yang ulet. Sembilan tahun memimpin kabupaten Gowa, Syahrul kemudian dimandatkan masyarakat Sulawesi Selatan menjadi Gubernur. Periode kedua pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan ini Syahrul Yasin Limpo kembali membuktikan bahwa dia adalah pribadi yang unggul, berprestasi, berpengalaman dalam birokrasi mengantarkannya kembali memimpin Sulawesi Selatan masa bakti 2013-2018, berpasangan Agus Arifin Nu'mang dengan "*tagline*" (SAYANG Jilid II) mampu mendulang 2.251.407 perolehan suara atau 52,42 % jauh dari pesaingnya Ilham Arief Sirajuddin-Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) meraih 1.785.580 suara (41,57 %) dan Andi Rudyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) meraih 257.973 suara (6,07 %). Dari 24 kabupaten/kota SAYANG unggul di 14 kabupaten/kota, IA menang di 9

kabupaten/kota. Sementara Garuda-Na hanya unggul di Sinjai, kabupaten di mana Rudiyanto menjalani periode keduanya sebagai Bupati¹.

Kesuksesan yang berhasil melambungkan Syahrul Yasin Limpo yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, terpilih secara aklamasi menduduki posisi tersebut lewat forum Musyawarah daerah ke-8 Partai Golkar Sulawesi Selatan di Makassar. Sebagai kendaraan politik yang populis partai Golkar merupakan partai politik dan merupakan salah satu dari 10 partai politik peserta pemilu 2014, mempunyai banyak dewan perwakilan di Indonesia sampai pada daerah. Dibandingkan partai politik peserta lainnya, elektabilitas Partai Golkar cenderung stabil mendekati Pemilu Legislatif 2014 yakni 17,1 %².

Pengalaman serta prestasi dalam meniti karir dipemerintahan maupun birokrasi mengantarkannya sebagai seorang yang punya pengaruh, serta daya pikat retorikanya yang bersahaja di kancah politik dengan berbagai perjalanan karir politiknya membuktikan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Hal inilah yang menjadi modal penting dan rasa simpatik masyarakat terhadap sosok Syahrul Yasin Limpo dalam menunjang kekuasaan dan kemenangannya di tingkat lokal.

Pencapaian dan kesuksesan aktor dalam konsep Kekuatan politik mempengaruhi politik yang berkembang di daerah yakni dengan partisipasi masyarakat terhadap kontestasi Pemilihan dan menentukan pilihannya terhadap

¹ Hasil rapat pleno KPU tingkat provinsi Sulawesi Selatan dan penetapan pasangan calon terpilih. <http://www.tribunnews.com/2013/02/01/ini-hasil-lengkap-pilgub-sulsel> diakses pada tanggal 3 Juli 2013 pukul 12:11 Wita.

² <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/02/survei-fsi-elektabilitas-golkar-stabil-melebihi-aburizal> diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 10:45 wita

sosok yang mewakili mereka, representasi dari mereka – mereka yang memilih atau putra daerah. Selangkah lebih didepan dibandingkan kandidat lainnya, Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah pemilihan pada Pemilu 2014 yang termasuk kabupaten terbesar ketiga Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone ini merupakan salah satu daerah kantong suara dari total 24 kabupaten/kota, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (SAYANG) dengan perolehan 312.199 atau 80,60 % suara. Raihan suara tersebut cerminan kuatnya dukungan terhadapnya. Masyarakat lokal Gowa menganggapnya sebagai representasi dari mereka sebagai etnis Makassar dan merupakan pemimpin yang membangun karir birokrasinya dari bawah.

Kabupaten Gowa sebagai daerah geografis Partai Golkar di anggap paling berpotensi memenangkan Pemilu 2014. Partai penguasa sejak masa pemerintahan Soeharto ini sangat di agung-agungkan apalagi di pelosok desa-desa, dimana mereka menganggap partai ini adalah partai pemerintah yang dapat membawa pemerintahan daerah mereka ke arah yang lebih baik, seperti pada masa pemerintahan Soeharto. Dari sinilah kedudukan politik ini dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh incumbent Syahrul Yasin Limpo dalam meniti karir juga birokrasinya.

Rangkaian proses pemilihan gubernur dan penetapan hasilnya oleh KPU menegaskan bahwa Syahrul Yasin Limpo masih dianggap pantas masyarakat kabupaten Gowa memimpin mereka dan sebagai bukti bahwa mantan Bupati Gowa 2 periode ini. Dukungan penuh partai-partai pengusung, posisinya sebagai *incumbent* menjadi bagian penting untuk menarik simpatik masyarakat lokal dan

menguasai birokrasi Kabupaten Gowa. Jadi, bila dibandingkan 2 kontestan yang lain bukan mustahil Syahrul Yasin Limpo memenangkan kontestasi Pemilu di Kabupaten Gowa.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) Pada Pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian seperti yang dipaparkan pada latar belakang, maka penelitian ini mengacu pada pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok, yaitu

- 1. Kekuatan politik apa saja yang menjadi faktor pendukung kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa ?**
- 2. Bagaimana kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo sebagai aktor politik pada pemilihan Gubernur 2013 di kabupaten Gowa ?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis kekuatan politik apa saja yang menjadi faktor pendukung kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur 2013.

2. Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo sebagai aktor politik pada pemilihan Gubernur 2013 di kabupaten Gowa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademik
 - a. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini, sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan dari aspek kekuatan politik.
 - b. Menjawab fenomena sosial politik yang ada.
 - c. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berminat mendalami penulisan mengenai kekuatan politik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat masih terbatasnya hasil penelitian tentang hal tersebut.
 - b. Sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana ilmu politik.
 - c. Untuk membantu para pelaku politik memahami realitas politik di Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan memaparkan aspek-aspek yang membahas masalah kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan gubernur 2013 daerah pemilihan kabupaten Gowa. Karena itu di bawah ini akan diuraikan 6 (enam) aspek yaitu: (A) Konsep dan Jenis Kekuatan Politik (B) Konsep Aktor, (C) Konsep Pemilukada (D) Kerangka Pikir, (E) Skema Kerangka Pikir.

A. Konsep dan Jenis Kekuatan Politik

1. Konsep Kekuatan Politik

Miriam Budiardjo Mengatakan bahwa yang diartikan dengan *kekuatan-kekuatan politik* adalah bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambil keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik³.

Baktiar Effendi Mengemukakan bahwa *kekuatan - kekuatan politik* adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif di

³ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 58.

dalam dunia politik. Beliau juga membagi kekuatan politik menjadi 2 sub bagian besar, yakni kekuatan politik formal dan kekuatan politik non-formal⁴.

2. Jenis Kekuatan Politik

Dalam suatu partisipasi politik, sering dikaitkan dan diukur dengan berdasar hasil pemilihan umum, perlu diperhatikan bahwa ada bentuk partisipasi lain, yaitu melalui suatu kelompok atau individu tertentu ataupun melalui media massa sebagai saran komunikasi politik. Partisipasi ini tentunya memerlukan adanya kekuatan untuk menghubungkannya dengan pemerintah atau sebaliknya. Kekuatan kekuatan inilah yang akan kita bahas.

2. 1 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan (Interest Group) adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah⁵.

Pada kajian historisnya, Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada abad ke 19. Organisasi ini berbeda dengan partai politik, mereka tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen, mereka lebih memfokuskan

⁴ Skripsi “Perbandingan Kekuatan Politik Militer Era Orde Baru Dengan Era Reformasi” oleh KIKI NAMIRA diakses pada 10 februari 2013 di <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/14868>.

⁵ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2007, hlm 85.

diri pada masalah-masalah tertentu saja. Meski tidak cukup mudah untuk membedakannya, karena partai politik antara lain juga memiliki kepentingan atas kebijakan pemerintah. Secara sederhana, Gabriel A. Almond, misalnya, membedakan dua hal ini: kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan kelompok kepentingan bukan untuk meraih kekuasaan, sementara partai politik untuk meraih kekuasaan.

Partai politik umumnya beranggotakan massa yang terdiri dari latar belakang yang berbeda namun punya kepentingan yang sama yakni kekuasaan sedangkan kelompok kepentingan keanggotaannya terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan dan hanya mempunyai satu tujuan yaitu “kepentingan” dalam kelompoknya (bukan kekuasaan).

Dasar dari kelompok ini adalah “protes”. Mereka sangat kritis terhadap cara-cara berpolitik dari para politisi dan pejabat, dan merasa terasingkan dari masyarakat. Mereka menginginkan desentralisasi pemerintah, partisipasi dalam peningkatan swadaya masyarakat, terutama masyarakat lokal. Kelompok-kelompok ini sering berinteraksi dengan badan eksekutif, dengan tetap memperhatikan kedudukan otonomnya terhadap negara (sering di sebut NGO).

Cara kerja kelompok ini sebanyak mungkin tanpa tekanan atau paksaan, tetapi melalui lobbying serta networking yang intensif tetapi persuasif. Akan tetapi jika cara ini kurang berhasil, mereka tidak segan-segan bertindak lebih

keras dengan mengadakan tindakan langsung seperti demonstrasi besar-besaran, pendudukan dan pemogokan, yang kadang-kadang berakhir dengan kekerasan.

Beberapa hal penting lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil akhir kegiatan kelompok kepentingan ialah Dari sisi internal organisasi, seperti; lingkungan keanggotaan, loyalitas anggota (menjadi anggota dari berbagai organisasi atau tidak), lingkup kegiatan, dan derajat ke dalam kegiatan. Dari segi cara dan sarana yang digunakan untuk memperjuangkan tuntutan, dapat dilihat, seperti: sifat teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok, bentuk tuntutan yang diajukan (terinci jelas atau umum dan kabur).

Dari segi eksternal organisasi, hal-hal seperti: derajat kesesuaian dan ketaatan tujuan dan kegiatan kelompok dengan norma-norma dan kebiasaan budaya politik yang berlaku, derajat kelembagaan kegiatan dan prosedur yang diikuti kelompok telah mengikuti pola yang ada atau berubah-ubah, dan derajat kemampuan kelompok memelihara akses komunikasi langsung dengan pemerintah yang hendak dipengaruhi, akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau hasil, akhir dari pada pencapaian tujuan kelompok kepentingan.

Namun yang tak dapat ditinggalkan begitu saja ialah artikulasi kepentingan dalam konteks perjuangan kelompok kepentingan dalam rangka menjembatani kepentingan-kepentingan warga. Oleh karena itu, warga Negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan kedalam agenda kebijakan Negara.

Setiap individu memiliki tujuan panggilan hidup yang berbeda-beda, begitu halnya dalam suatu kelompok, kelompok yang satu beda dengan yang lainnya, kelompok itu terbentuk karena adanya kesamaan antara anggotanya. Sehingga Kelompok-kelompok ini terbagi-bagi menjadi jenis yang lebih sederhana seperti yang dikemukakan oleh. Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell yakni membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori yaitu : (1) kelompok anonim, (2) kelompok non-asosiasional, (3) kelompok institusional, (4) kelompok asosiasional⁶. Keseluruhan kelompok itu bergerak dalam fokus tuntutan masing-masing terhadap kebijakan pemerintah untuk memperjuangkan tuntutan yang sama yakni kesetaraan. Hal itulah yang saya sebut dengan kekuatan politik.

2. 2 Kelompok Penekan

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi pressure Group⁷.

⁶ Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell, def, *Comparative Politics Today : A World view*, edisi ke-5 (New York: Harpen Collins, 1992) helm. 62-65 yang dikutip dalam buku Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 387.

⁷ Leo Agustino. *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. (Yogyakarta:Penerbit Pustaka Pelajar,2008) hlm 17.

Sejarah perjalannya, proses demokratisasi di Indonesia sendiri sangat jelas didorong oleh kelompok-kelompok penekan yang berasal dari beragam kalangan di masyarakat, beberapa di antaranya adalah, lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga penelitian swadaya masyarakat, media massa, organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai-partai politik, dan lain sebagainya. Jumlah kelompok penekan yang beragam ini dapat bertambah banyak manakala setiap kelompok di masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui asosiasi atau kelompok yang begitu bebas didirikan dan begitu bebas bersuara.

Perlu diketahui bahwa pelopor gerakan kelompok penekan banyaknya bermunculan organisasi-organisasi kecendekiawanan yang berafiliasi pada agama, pembentukan kelompok-kelompok diskusi dan aksi oleh mahasiswa di intra-kampus dan ekstra kampus, dan organisasi-organisasi massa lainnya di masyarakat, yang semuanya memperjuangkan kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik tanpa rasa takut terhadap rezim cendana saat itu.

Dari titik pijak persoalan ini, peran kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (*pressure forces*), tetapi juga kendali sosial (*social control*), pendidikan politik (*political education*) dan pembangunan kesadaran (*awareness building aspect*).

2.3 Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Menurut Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo) bahwa “partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun Sedangkan menurut R.H Soltau (dalam Budiardjo, 2000:161) bahwa “partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum⁸.

Negara yang menggunakan sistem demokrasi, partai-partai politik memegang peranan penting. Partai politik digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Hal ini berarti bahwa partai-partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kepada kekuasaan dibandingkan dengan kebijakan publik. Namun demikian, kita tidak dapat mengabaikan begitu saja pengaruh mereka dalam proses pembuatan kebijakan.

Peran partai politik dalam masyarakat modern seringkali melakukan agregasi kepentingan. Partai-partai politik tersebut berusaha untuk mengubah

⁸ Miriam Budiardjo, Ibid Hal. 404

tuntutan-tuntutan (*demands*) tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif kebijakan. Ukuran partai politik yang bersangkutan akan menentukan cara partai politik tersebut dalam mengagregasikan kepentingan.

Pada umumnya, walaupun partai-partai politik ini mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kelompok-kelompok kepentingan, namun mereka lebih cenderung bertindak sebagai perantara daripada sebagai pendukung kepentingan-kepentingan tertentu dalam pembentukan kebijakan. Bahkan kemajuan dan kehancuran negara bisa disebabkan oleh partai politik dimana partai politik sebagai *supplier* daripada calon pemimpin negara ini.

2. 4 Aktor politik

Sebelum lebih jauh membahas tentang aktor, Penulis membatasi di sini bahwa yang dimaksud aktor politik adalah orang-orang yang berpengaruh dalam kegiatan politik, baik itu individu maupun sekelompok individu. Dalam definisi ini, aktorlah yang bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam sistem politik.

Dalam membahas pemeran serta atau aktor-aktor dalam proses perumusan kebijakan, ada perbedaan yang cukup penting yang perlu diperhatikan antara negara-negara berkembang (negara Dunia Ketiga) dengan negara maju. Di negara berkembang, struktur pembuatan kebijakan cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecenderungan struktur pembuatan keputusan di negara-negara maju adalah lebih kompleks karena kualitas hidup sudah menjadi isu utama (*main issue*) dalam pembuatan kebijakan (*policy making*).

Namun menurut Moore (dalam Badjuri dan Teguh Yuwono) bahwa, “secara umum aktor ini dapat dikelompokkan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*)”⁹. Ketiga aktor ini saling berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik.

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik adalah aktor *inside of government* dan *outside of government* atau aktor publik, aktor privat dan aktor *civil society*.

2. 5 Militer

Militer dan politik ibarat dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Peranan militer di dalam lingkungan kekuasaan merupakan kesatuan mutlak dan tidak terlepas dari sebuah prinsip dasar pendirian negara yang menuntut dan mengedepankan pentingnya lembaga-lembaga tersruktur. Merupakan tugas dari militer yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kedaulatan sebuah negara. Di negara-negara Barat, yang menganut prinsip supremasi sipil, peran militer cenderung dikendalikan oleh para politisi sipil. Tetapi, hal ini tidak berarti sistem pemerintahan Barat menafikkan peran serta militer dalam pemerintahan. Hal ini dinyatakan oleh C. Wright Mills (1956) dalam Marjhan yang menyebutkan bahwa, “Militer merupakan satu dari tiga kelompok yang paling berpengaruh, secara politik di Amerika Serikat. Pengaruh

⁹ Abdulkahar Badjuri dan Yuwono Teguh. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategis*. (Semarang: Universitas Diponegoro Press), 2007;

itu khususnya, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan politik luar negeri.”¹⁰

Institusi militer memiliki perbedaan dengan institusi lainnya karena militer memiliki ciri khusus dan keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh kelompok masyarakat lainnya, termasuk masyarakat sipil. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Herman Finer dalam Arbi Sanit dalam Hanifah, yakni:

1. Tentara lebih terorganisir,
2. Memiliki sentralisasi komando,
3. Terdapat jenjang hirarki,
4. Disiplin,
5. Komunikasi intern dan lancar,
6. *Esprit de corps*.

Dan yang paling penting adalah hak untuk melakukan monopoli terhadap kepemilikan senjata oleh pihak militer. Selain itu, Arbi Sanit¹¹ juga mengemukakan bahwa ditinjau dari segi sosial. Militer juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu: *Pertama*, lebih cepat berkenalan dengan teknologi. *Kedua*, proses akulturasi lebih mengarah kepada ke arah teknologi, dan *Ketiga*, lebih mengarah kepada negara secara keseluruhan.

Menurut Pengamat Politik, Eep Saefulloh Fatah ada beberapa alasan yang mendorong keterlibatan militer ke dalam dunia politik pada masa Orde baru,

¹⁰ C. Wright Mills dalam Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 243.

¹¹ Arif Yulianto, *Militer dan Politik Di Indonesia Pasca Orba* dalam Hanifah Hanafie(2007), hlm. 28.

yakni¹²: *Pertama*, karena adanya dorongan dari fenomena umum Dunia Ketiga, yang memunculkan anggapan bahwa militer pada masa Orde Baru adalah kekuatan sosial-politik yang paling siap dalam hal organisasi dan skills untuk memasuki birokrasi.

Kedua, keadaan awal pada masa Orde Baru yang ditandai dengan kecurigaan terhadap pemimpin-pemimpin sipil yang berasal dari partai politik.

Ketiga, adanya proses penetrasi yang memunculkan paradigma bahwa militer adalah pihak yang dianggap paling sesuai sebagai penguasa politik, serta dapat menciptakan keadaan stabil dalam tatanan pemerintahan. Lalu yang *keempat*, hilangnya kekuatan legitimasi terhadap pemimpin-pemimpin sipil yang berasal dari partai politik yang menyebabkan terbukanya jalan lebar bagi militer untuk maju ke dalam politik dan merebut kekuasaan.

Munculnya peranan militer yang terlalu mendominasi tatanan politik pada masa Orde Baru ternyata berdampak secara hegemonik pada tatanan pemerintahan. Meskipun keadaan yang relatif stabil dan ditandai dengan pembangunan yang maju dalam segala bidang. Proses demokratisasi menjadi terhambat dan jalan di tempat karena adanya penekanan yang terlalu berlebihan oleh pihak-pihak militer. Hal inilah yang mendasari kelompok sipil untuk kembali bangkit meraih kembali kekuasaan yang telah dipegang oleh militer selama kurang lebih 32 tahun.

Menguatnya tuntutan terhadap arus demokrasi yang memuncak dengan adanya reformasi pada 28 Mei 1998 telah menjadi bukti bahwa adanya kejenuhan

¹² [http://mediaindonesia.com/artikel: M Alfan Alfian M//Perubahan Politik dan Reformasi Militer//](http://mediaindonesia.com/artikel: M%20Alfan%20Alfian%20M//Perubahan%20Politik%20dan%20Reformasi%20Militer//)

rakyat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh pihak militer. Mengingat ada beberapa permasalahan yang timbul, seperti pembatasan terhadap demokrasi, pengontrolan yang ketat terhadap masyarakat, serta menjadi alat sebagai pelanggeng kekuasaan penguasa, hingga pelanggaran HAM.

Semua permasalahan inilah yang mendasari wacana pemisahan kembali antara militer yang dalam hal ini adalah TNI untuk kembali kepada *khitah*-nya. Meskipun kita belum mengetahui seberapa ikhlas kelompok militer untuk rela meninggalkan kancah perpolitikan di Indonesia. Namun yang pasti, arus demokratisasi yang menuntut terbentuknya profesionalisme dalam militer telah menjadi salah satu sebab terbesar bagi mereka untuk meninggalkan dunia perpolitikan.

2. 6 Media Massa

Melalui teropong analisis agenda denting media massa, bangsa ini selalu dipertontonkan, dan seperti terjebak oleh permainan drama panggung politik yang selalu menjadi kamufase demokrasi politik, seakan masih jauh dari perjuangan menuju perbaikan dan kemajuan mengenai kesejahteraan rakyat. Karena hakekatnya drama politik adalah drama perebutan dan mempertahankan kekuasaan (power) , keabsahan (legitimate) dan kewenangan (authority). Hal tersebut terjadi karena media massa dengan pemberitaannya diyakini oleh banyak orang (termasuk banyak pembuat keputusan) sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Perspektif teori komunikasi massa yang menempatkan media massa yang linier terhadap khalayaknya.

Sebelum lebih jauh membahas tentang media massa, ada baiknya untuk memahami makna media massa itu sendiri. Media massa adalah saluran yang di gunakan untuk mempermudah transaksi informasi dan komunikasi. Melalui media ini, seseorang bisa selalu memperbarui wawasannya tentang fenomena kekinian. Bahkan tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkannya.

Di Indonesia dikenal ada 3 jenis media massa, 1) Media Cetak, 2) Media Elektronik, 3) Media Internet. Ketiga-tiga itu selalu mengalami perkembangan dan pemuhtahiran teknologi karena media di anggap sebagai sarana penghubung manusia satu dengan lainnya tanpa memerlukan biaya yang mahal. Media cetak sering kita jumpai, ada yang berupa surat kabar, majalah, bahkan buku pelajaran di anggap sebagai media massa. Sedangkan media elektronik bisa seperti Tv, Hp, dan Radio. Sedangkan Media internet adalah segala jenis data yang kita peroleh dalam dunia maya. Baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Begitulah proses komunikasi, tidak begitu sulit tapi sangat mudah untuk di mengerti karena fakta sekarang bahwa manusia sudah sangat dekat dengan media massa tersebut dan sulit untuk terpisahkan.

Dalam sejarah, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi pasca orde baru. Bahkan media massa yang sebelumnya menjadi kontrol pemerintah orde baru, telah memiliki andil yang cukup besar bagi penyebaran gagasan dan gerakan tentang pentingnya mengakhiri pemerintahan orde baru yang otoriter¹³. Media massa adalah sarana untuk menyampaikan

¹³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 303

kebenaran, memberi doktrin dan dogma pada setiap mereka yang membaca maupun mendengarnya untuk menjadi terprovokasi dan mengikuti wacana media.

Pasca pemerintahan orde baru telah memungkinkan media massa tumbuh dan berkembang tanpa kontrol yang kuat dari pemerintah. Meskipun demikian, pada akhirnya media massa tidak lepas dari hukum pasar. Sebagai konsekuensi dari persaingan untuk memperebutkan hati khalayak. Pada akhirnya hanya media massa tertentu yang mampu bertahan dan berkembang.

Kita tidak bisa pungkiri bahwa kebanyakan masyarakat kita diracuni oleh godaan harta, namun kita tidak boleh menyalahkan apabila seseorang fokus untuk menjadi kaya, tapi masalahnya apabila mereka memperolehnya dengan jalan rekayasa media atau membohongi khalayak tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Zaman sekarang para politisi memperebutkan simpati media tertentu untuk mempromosikan dirinya sebagai salah seorang kandidat yang akan berkuasa nantinya. Politik kuasa media, begitulah yang sering kita dengar, pihak media pun juga tidak bisa menolak karena tergiur oleh bayaran yang memuaskan bagi konsumennya. Tapi apakah akan seperti ini terus ? apakah media hanya berpihak pada yang Beruang, bukan kepada masyarakat. Memang tidak semua media seperti itu namun pada kenyataannya sebagian besar telah menjadi kekuatan politik suatu politisi tertentu. Saat ini yang menjadi pernyataan adalah MEDIA MENGONTROL ATAU DIKONTROL ? Media sebagai kekuatan politik bagaikan musuh dalam selimut, terkadang dia membelah, terkadang dia melawan tergantung apa yang mengakomodasinya.

2. 7 Organisasi Keagamaan

Roland Robertson membuat suatu model yang menggambarkan hubungan antara tingkat homogenitas dan heterogenitas agama yang dianut suatu masyarakat dikaitkan dengan organisasi keagamaan, ke dalam empat tipe:

- a. Pada masyarakat yang memiliki heterogenitas dalam agama, ada dua tipe: yaitu agama secara organisasi terpisah dari kehidupan ekonomi, politik, dan pendidikan; dan agama yang tidak begitu terorganisir.
- b. Pada masyarakat yang memiliki homogenitas agama, juga ada dua tipe: yaitu agama terorganisir dengan baik, dan agama diakui secara resmi sebagai agama negara; dan tidak terorganisir seperti pada masyarakat primitif.

Pola interaksi dan **relasi** antar organisasi keagamaan, sebagaimana yang terjadi pada pola interaksi dan relasi pada individu, interaksi dan relasi organisasi keagamaan ini bisa bersifat kompetisi, konflik, dan kerjasama.

Tipologi organisasi keagamaan: secara umum tipologi organisasi keagamaan ada yang sifatnya **melekat** dan **terlepas** dari struktur agama yang bersangkutan. Dalam agama Kristen misalnya, terdapat struktur hierarkial dari gereja di Vatikan yang bersifat internasional sampai ke tingkat lokal; sementara dalam Islam tidak ada organisasi yang semacam itu. **Tipologi organisasi keagamaan** yang lain bisa dilihat dari:

- 1) Sifat **pembentukannya**, ada organisasi keagamaan yang merupakan bentukan pemerintah dan bahkan masuk dalam struktur pemerintahan (MUI, PGI, Walubi dst), dan yang merupakan inisiatif murni dari para penganutnya (NU, Muhammadiyah, Persis, dst);

- 2) **Orientasinya**, ada organisasi keagamaan yang berorientasi kemasyarakatan (NU, Muhamadiyah), politik (PKS dan HTI), dan profesi-keilmuan (ICMI);
- 3) **Keanggotaan**, ada organisasi keagamaan yang terbuka (inklusif) dan ada yang bersifat tertutup (eksklusif);
- 4) **mazhab**, ada organisasi keagamaan yang bebas mazhab dan ada yang menekankan pada mazhab tertentu’
- 5) **Pola berpikir**, ada organisasi keagamaan yang bercorak liberal dan konservatif;
- 6) **ijtihad**, ada organisasi keagamaan yang menggunakan pola ijtihad tekstual dan kontekstual, ada yang sangat menekankan ijtihad dan ada yang cukup dengan taklid atau ittiba’;
- 7) **Sikap keagamaan**, ada organisasi keagamaan yang masuk dalam kaategori fundamentalis-militan dan fundamentalis-moderat;
- 8) **Respon terhadap tradisi**, ada organisasi keagamaan yang bercorak puritanis dan ortodok yang mempertahankan kemurnian ajaran, dan organisasi keagamaan yang akomodatif- modifikatif;
- 9) **Respon terhadap perkembangan**, ada organisasi keagamaan yang menekankan tradisi modernitas-reformitas dan ada yang mempertahankan pola lama atau tradisional;
- 10) **Orientasi dunia- akhirat**, ada organisai keagamaan yang sangat menekankan kepentingan akhirat dan ada yang menekankan keberimbangan antara keduanya; dan

- 11) **Sifat keorganisasian**, ada organisasi keagamaan yang samar-samar seperti pengikut suatu mazhab yang tidak ada struktur pengurusnya, dan organisasi keagamaan yang jelas struktur keorganisasiannya.

Telah dijelaskan di atas tentang apa itu organisasi keagamaan. Sekarang mari kita lihat hubungannya dengan politik dalam hal ini sebagai kekuatan politik. Bisa kita lihat dalam fakta sejarah jatuhnya pemerintahan orde baru memiliki implikasi yang cukup penting terhadap relasi agama dan politik. Meskipun tidak seperti revolusi politik. Perubahan-perubahan kelembagaan politik termasuk cukup cepat. Kelompok-kelompok yang ada di dalam maupun yang sudah ada melakukan rekonstruksi sendiri-sendiri tentang pelebagaan politik. Kekuatan-kekuatan itu berupaya untuk menikmati yang namanya kebebasan dengan membentuk partai-partai baru. Bahkan para pendiri partai baru itu merupakan salah satu anggota dari partai yang sudah ada dulu (PPP, Golkar, PDI).

Pasca orde baru, warna perpolitikan diwarnai oleh munculnya partai baru yang kebanyakan bercorak keagamaan.

1. Islam

PPP, PKB, PBR, PBB, PAN, PKS, PPTI, AKMSI, PSII, Masyumi Baru, PKU, PNU, KAMI, dan masih banyak lagi.

2. Budha

Partai Buddhist Demokrat Indonesia

3. Katolik

Partai Demokrat Katolik, Partai Katolik Demokrat

4. Protestan

Partai Krisna,

Ormas keagamaan baik dalam tinjauan teoritis-normatif maupun historis-empirik menempati posisi strategis dalam melakukan pemberdayaan politik masyarakat. Secara historis posisi yang pernah dimainkan memiliki efektifitas melebihi peran dan posisi yang dimainkan oleh organisasi politik formal, hal ini seperti yang ditunjukkan oleh gerakan politik etis yang dilakukan oleh dua ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU¹⁴.

2. 8 Birokrasi

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi berkembang tanpa didahului oleh demokratisasi. Indonesia mempunyai sejarah birokrasi kerajaan yang meletakkan para birokratnya (kaum ningrat dan abdi dalem) sebagai instrumen untuk melayani kepentingan raja, lalu muncul birokrasi kolonial yang dikembangkan secara rasional (Weberian) untuk memenuhi kepentingan negara penjajah, dan sejak kemerdekaan sampai sekarang birokrasi merupakan organisasi besar dan modern di tengah masyarakat yang belum terbiasa berorganisasi. Sejak pemerintahan Orde Baru birokrasi berkembang merupakan lembaga yang sangat dominan dalam sistem politik Indonesia, dengan fungsi yang sangat banyak, sebagai instrumen dalam pelayanan publik, sebagai agen pembaharuan dan pembangunan, dan sebagai kekuatan politik untuk mendukung kekuasaan baik pada birokrasi sipil maupun militer. Pengalaman yang demikian buruk dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, maka pada saat ini diusahakan birokrasi netral

¹⁴ Faisal Ismail, *Islamic Traditionalism in Indonesia*, (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan. 2003) RI. Hal.94-95

dimana setiap unsur dalam birokrasi tidak boleh melaksanakan kegiatan politik praktis.

Bilamana campur tangan politik yang begitu besar dari birokrasi dikawatirkan akan terjadi loyalitas kepada penguasa tidak terbatas pada melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pimpinan eksekutif, tetapi sebagai instrumen yang handal dari kepemimpinan eksekutif untuk mencapai tujuan politik yaitu meraih dan mempertahankan kekuasaan. Hanya jika birokrasi benar-benar netral, partai politik akan dapat berkembang menjadi besar, dan besarnya partai-partai politik akan membuat kekuasaan terbagi kedalam pusat-pusat kekuasaan yang lebih banyak, dan hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan bobot proses *check and balance* dalam mekanisme politik yang sehat.

Kehadiran birokrasi publik bagaimanapun sangat diperlukan bagi tegaknya sebuah negara yang berdaulat. Pengembangan demokrasi tidak boleh tidak memerlukan keterlibatan birokrasi, karena birokrat dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh politisi. Kadang-kadang birokrasi modern cenderung berkembang mengikuti wataknya sendiri yang secara fundamental berlawanan dengan karakter demokrasi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa demokrasi bercirikan populis, sementara birokrasi mempunyai ciri-ciri hirarkis.

Nilai yang dominan dalam demokrasi adalah keadilan, sementara untuk birokrasi nilai yang dominan adalah efektif dan efisien. Demokrasi ditegakan atas dasar nilai kesamaan (*equity*) dan persamaan hak, dan pengambilan keputusan bersifat partisipatory keputusan atau kebijakan yang diambil politisi merupakan

melaksanakan kehendak rakyat, dan politisi harus mempertanggung jawabkan semua kebijakan yang diambil kepada rakyat dari mana kekuasaan mereka berasal. Sebaliknya birokrasi ditegakan atas dasar perbedaan status dan peranan (spesialisasi dan hirarkis). Arus keputusan dan perintah mengalir dari atas (manajer/pimpinan) ke bawah (bawahan/pengikut), dan arus pertanggungjawaban mengalir dari arah sebaliknya. Kontroversial semacam ini telah lama diketahui dan banyak dari teori politik dan administrasi negara membiarkan begitu saja. Politik sudah selayaknya bercirikan demokrasi dan birokrasi selayaknya lebih bersifat otoriter. Mereka punya lingkungan hidup sendiri-sendiri yang berbeda tanpa perlu saling mengkritik satu sama yang lainnya. Konsep dikotomi administrasi dan politik dari Wilson (1987) didasarkan pada asumsi seperti tersebut. Politik dan administrasi (birokrasi) adalah dua dunia yang berbeda yang harus dikembangkan secara berbeda pula.

Untuk itu setidaknya-tidaknya ada empat nilai yang harus dimiliki birokrasi;

1. Peranan birokrasi harus senantiasa bertujuan untuk melayani kepentingan umum. Oleh karena itu birokrasi harus mendahulukan kepentingan umum diatas segala kepentingan lainnya. Birokrasi sebagai pembuat kebijakan public dan sekaligus sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat lembaga politik. Birokrasi berdaya guna hanya dapat dicapai oleh birokrat-birokrat yang profesional dan mandiri.
2. Untuk dapat melayani kepentingan umum dengan baik, profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi yang rasional dan bukan yang bersifat patrimonial. Pendidikan yang profesional memungkinkan

aparatur meningkat kemampuannya didalam penguasaan teknologi di kehidupan modern yang rasional.

3. Prinsip the right man on the right place perlu dipegang teguh. Prinsip ini mesyaratkan dua hal. Pertama, rekrutmen dan penempatan birokrat haruslah melalui proses seleksi yang terbuka, dalam arti bahwa syarat serta prosedurnya diketahui secara umum. Yang tidak kalah pentingnya, kedua adalah bahwa sistem seleksi hanya mengutamakan keahlian dan ketrampilan, birokrasi bukanlah jabatan politis, atau pribadi dan kelompok, yang harus benar-benar melakukan proses seleksi obyektif.
4. Para politisi yang telah dipilih langsung oleh rakyat duduk di lembaga legislative dan sebagai pemimpin Birokrasi, harus memperjuangkan seluruh kepentingan warga negara bukan memperjuangkan dirinya, partai atau golongan tertentu saja.

C. Konsep Aktor

Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin *agere*, yang berarti “berbuat, melakukan”. orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang. *Auctor* merupakan asal-usul untuk kata Inggris author yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”. Aktor mempunyai arti lebih luas; pembuat atau pelaku. Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*). Mereka

adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.

Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik.

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.

Secara sederhana aktor politik mempunyai keunggulan dibandingkan kandidat lain dalam kaitannya dengan kontestasi Pemilu, Levi Strauss mengkategorikannya menjadi 4 yakni : *Pertama Modal ekonomi*, yang mencakup materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan. *Kedua, Modal Kultural/budaya*, yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar keserjanaan). *Ketiga Modal sosial*, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki aktor (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antar

individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. *Keempat Modal simbolik*, mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi atau dengan kata lain ketokohan seorang aktor.

D. Konsep Pemilukada

Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk memilih pemimpin di daerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan secara demokratis.

Penjelasan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 24 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala daerah yang dimaksud adalah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota disebut Walikota.

Seseorang yang berminat atau ingin menjadi kepala daerah mencari dukungan dari salah satu atau beberapa basis partai. Gunanya untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat untuk mendaftarkan diri kepada pengurus partai guna dicatat sebagai salah satu bakal calon (Balon) kepala daerah. Sesudah itu, masing-masing harus mencari dukungan yang lebih luas agar mendapat suara mayoritas dalam pemilihan calon. Tentu saja kepala daerah dan wakilnya, bisa memperoleh dukungan lewat berbagai cara seperti bujukan, persetujuan ataupun manipulasi.

Bakal calon juga harus mempersiapkan kertas kerja untuk dipresentasikan dalam sebuah “debat publik” intern partai. Yang kenyataannya tidak lebih dari *show*, karena memang tidak pernah terjadi perdebatan yang sesungguhnya karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Setelah proses tersebut dilalui, ditetapkanlah calon kepala daerah untuk diajukan kepada DPRD

yang prosedurnya relatif sama dengan proses penyaringan bakal calon menjadi calon tetap. Bedanya, ada tahap akhir pemilukada yaitu masing-masing calon harus mengikuti *fit and proper test* di depan tim atau pleno DPRD.

Pada berbagai masyarakat politik, menghormati atau mendukung pemerintah adalah faktor kultur yang sudah berakar. Selainnya, seperti dalam bentuk egalitarisme dan kebebasan mengkritik pemerintah diizinkan. Dengan demikian, dukungan khusus menunjukkan besarnya nilai demokrasi, sedangkan dukungan menyebar mengarah pada nilai diktator. Karena, penekanan penghormatan terhadap penguasa semata-mata (kultur individu) dan dengan gagalnya masyarakat membedakan sasaran-sasaran politik, akan mengarahkan rakyat kepada anti demokrasi dalam orientasi politik.

Menurut Abdul Asri Harahap bahwa Pemilukada bukan hanya memilih penguasa daerah tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk kepentingan sebuah rakyatnya.¹⁵ Pola pikir lama yang lebih menempatkan kepala daerah sebagai penguasa yang harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). Secara umum kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Kepala Daerah, dan

¹⁵ Abdul Asri Harahap. *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Cidesindo, 2005. Hal. 115

perangkat daerah (UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah). Semua tingkatan daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung, dengan tujuan agar rakyat di daerah yang bersangkutan dapat secara bebas dan bertanggung jawab memilih kepala daerahnya yang berkualitas.

Penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan ini adalah bagian dari pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan langsung ini adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atas mandegnya pembangunan demokrasi di tingkat lokal¹⁶. Pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2005, yang diselenggarakan di 226 daerah, yang meliputi 11 Propinsi, 180 kabupaten dan 35 kota¹⁷.

Dalam kaitannya dengan fungsi dasar pemilihan umum tersebut, akan ada beberapa fungsi dari pemilihan langsung yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu:

- a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik.
- b. Fungsi Perwakilan Politik
- c. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Masyarakat

Pemilihan langsung diselenggarakan dengan sistem dua putaran. Artinya, kalau pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, akan diadakan putaran kedua dengan peserta dua pasang calon yang memperoleh suara terbanyak. Yang menjadi tujuan pokok

¹⁶ H.Rudini. 1994. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Hal 139.

¹⁷ Kacung Marijan. 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Hal 18

adalah adanya pasangan calon yang terpilih mempunyai legitimasi kuat dengan perolehan suara 50% plus satu (mayoritas mutlak). Seandainya pada putaran kedua tidak ada yang memperoleh suara 50% plus satu, yang akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan pemenang adalah pemerataan dukungan suara di tingkat kabupaten/kota. Dalam suatu masyarakat demokratis, rakyat berperan tidak untuk memerintah atau menjalankan keputusan-keputusan politik. Namun terdapat pemilihan umum yang berperan untuk menghasilkan suatu pemerintah atau suatu badan penengah lainnya yang pada gilirannya menghasilkan suatu eksekutif nasional dan pemerintah¹⁸.

E. Kerangka Pemikiran

Kekuatan politik adalah pemahaman mengenai segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif di dalam dunia politik. Dukungan kelompok atau unsur masyarakat sebagai unsur dari kekuatan politik baik itu berupa individual, maupun lembaga yang berada di daerah merupakan modal penting guna menunjang kemenangan mutlak terhadap seseorang yang yang terjun ke ranah politik seperti Pemilu. Maju sebagai *incumbent*, Syahrul mengoptimalkan kekuatan politiknya di kab. Gowa yakni birokrasi sipil dan partai politik dalam hal ini partai Golkar dan partai pengusungnya serta, persiapan yang kemudian ditujukan guna memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya. Politik lokal sebagai rangkaian proses politik di daerah mengemuka sudah sejak lama, hingga pada akhirnya terbentuk demokrasi di Indonesia politik lokal yang

¹⁸ Tesis Sugiprawaty, *Etnisitas, Primordialisme, Dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Th 2007-2008)*, Hal. 10

dinamis makin menonjolkan dirinya pada perhelatan Pemilu pada 22 Januari 2013 yang lalu.

Aktor merupakan pelaku dalam sebuah sistem politik dan merupakan orang-orang berhasil yang dianggap mampu memberi pengaruh dalam lapisan masyarakat. Masalah ini digabungkan teori atau konsep yang akan dipergunakan untuk menjelaskan masalah. Actor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Actor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh aktor politik.

Indikasi kesuksesan Syahrul Yasin Limpo terlihat dari kemampuannya menerapkan strategi serta ditunjang kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. *modal kultural/budaya*, dengan latar belakang sebagai seorang politisi meniti karirnya di pemerintahan sembari menyelesaikan Magister Pasca Sarjana LAN-Unhas pada 1999, Master Hukum pada 2004, serta gelar Doktor di almamater yang sama pada 2007. Pernah Memimpin Kabupaten Gowa selama 9 tahun mengantarkan dikategorikan sosok pemimpin ideal. Maraknya prestasi membuat ia dipercaya menjabat Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), atau sering disebut dengan “Gubernurnya” para gubernur se-Indonesia.

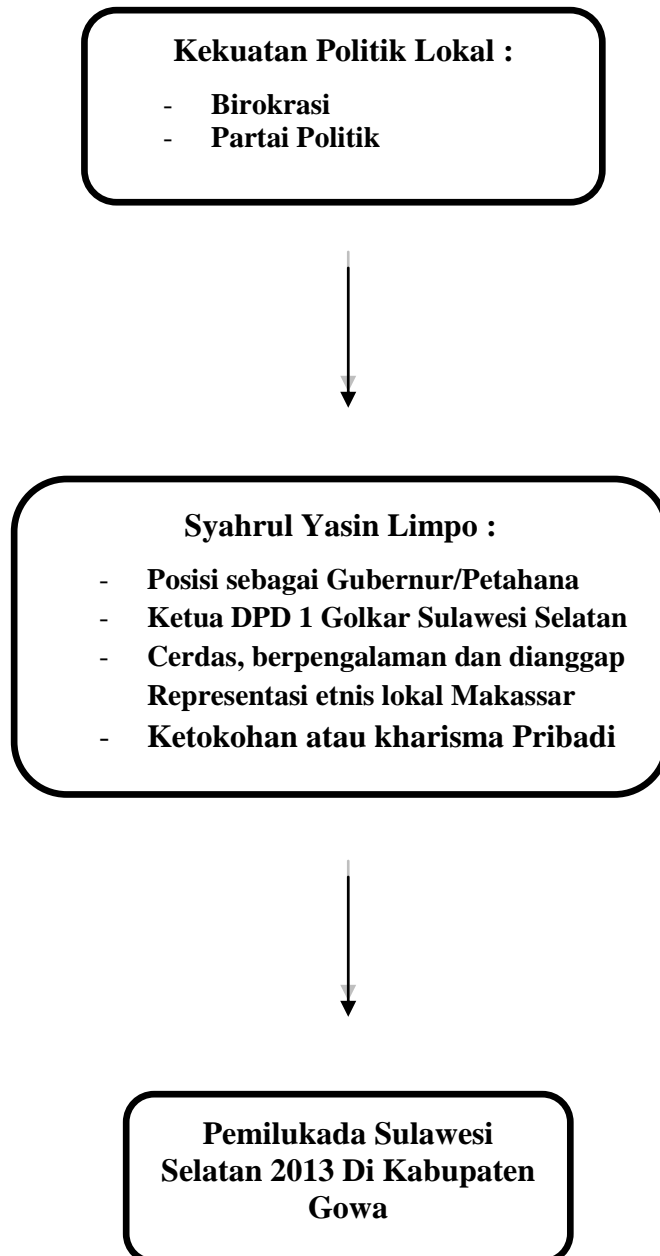
Modal sosial, merupakan atribut individu atau sumberdaya sosial yang digunakan aktor dengan beragam interaksi sosial dengan adanya hubungan dengan orang lain yang dapat membangkitkan imbalan (*return*) material dan non-material kepada komunitas. Posisinya sebagai gubernur memanfaatkan sumber

daya yang ada dengan memanfaatkan kedudukan menjangkau lapisan lapisan masyarakat. Syahrul Yasin Limpo dianggap berpengalaman dalam pemerintahan dan dalam proses kemenangannya dianggap juga oleh masyarakat sebagai representasi etnis makassar.

Modal simbolik, mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi atau dengan kata lain ketokohan seorang aktor politik Syahrul Yasin Limpo yakni Ketua DPD 1 Partai Golongan Karya.

Modal inilah yang dicirikan sebagai aktor politik, posisinya sebagai *incumbent*, Syahrul Yasin Limpo mampu dioptimalkan secara berkelanjutan dari periode pertama 2008-2013 dan puncaknya pada kemenangannya periode 2013-2018. Dengan kata lain Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok/individu kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.

F. Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dipaparkan hal-hal yang dianggap relevan dengan pembahasan ini yaitu : menyangkut lokasi dan waktu penelitian, unit analisis data, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

A. Unit Analisis Data

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah perolehan suara partai Golkar kabupaten Gowa, yang sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, yaitu kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013 daerah pemilihan Kabupaten Gowa. Penelitian dilakukan dan berfokus di kecamatan Somba Opu Sehingga penggalian mengenai informasi lebih dioptimalkan di kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan karena daerah ini merupakan wilayah geografis pusat pemerintahan kabupaten Gowa dimana Ichsan Yasin Limpo menjadi Bupati dan Lokasi DPD II Golkar yang di ketuai Hj. Tenri Ole Yasin Limpo. Terlebih lagi, penulis ingin melihat lebih jauh kekuatan politik lokal apa saja yang terbangun dan pengaruh Syahrul Yasin limpo terhadap proses kemenangannya.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian diarahkan untuk menganalisis dan menggambarkan fakta serta argumen yang tepat. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi serta memberikan gambaran mengenai kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur 2013 daerah pemilihan Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif, sehingga mampu menjawab realitas sosial yang terjadi pada masyarakat dengan menentukan fokus terhadap masalah secara terperinci serta memiliki kajian tentang fenomena masyarakat yang selalu berubah (dinamis). Penelitian ini memahami apa yang dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis perlukan ini adalah *Data primer* yaitu, sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli dan *Data sekunder* yaitu, sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Kedua jenis data tersebut di peroleh melalui :

1. Data Primer

Penulis menggunakan data primer berdasarkan kumpulan informasi yang penulis butuhkan, diantaranya penulis banyak mengambil data melalui wawancara terhadap informan. Pelaksanaan teknik ini penulis terjun langsung ke Kabupaten Gowa sebagai daerah penelitian dengan mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan informan. Informan disini yang dimaksud adalah orang-orang yang dianggap paham tentang kekuatan politik lokal Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Gowa. Penulis mewawancarai ketua/anggota tim pemenangan SAYANG Kabupaten Gowa, tokoh pemuda Kabupaten Gowa, tokoh masyarakat kabupaten Gowa. Proses wawancara tersebut, penulis menggunakan alat perekam dan catatan lapangan.

2. Data Sekunder

Penulis juga melakukan telaah pustaka dengan menggunakan buku, jurnal, dan koran yang berkaitan kekuatan politik. Dalam hal ini penulis juga

menggunakan literatur, dokumen dan referensi di Internet untuk mengakses situs-situs atau website untuk memperoleh data yang lebih akurat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Supaya hasil wawancara terekam dengan baik maka diperlukan alat bantu dalam melaksanakan wawancara tersebut, seperti alat perekam untuk merekam percakapan dengan informan, selain itu peneliti juga menggunakan catatan lapangan untuk mencatat poin-poin penting (ini selama proses wawancara). Penelitian ini mengambil data primer dari wawancara yang telah dilakukan terhadap komponen masyarakat. Komponen-komponen masyarakat yang dimaksud disini yakni informan yang sengaja dipilih untuk diwawancarai yang dianggap paham terhadap masalah yang akan diteliti. Informan yang dipilih untuk diwawancarai secara mendalam pada pengumpulan data tersebut yaitu :

- a. Ansar Usman selaku ketua Tim Pemenangan SYL-Agus (SAYANG) Kabupaten Gowa.
- b. Tokoh Partai Golkar Kabupaten Gowa, Kamaruddin Timung
- c. Tokoh Masyarakat Kabupaten Gowa, Muhammad Said
- d. Tokoh pemuda Kabupaten Gowa Andi Nurdin S.Pd
- e. Masyarakat.

Penulis juga mewawancarai tim kerja pemenangan yang telah berhasil memenangkan Syahrul Yasin Limpo pada tahun 2008 lalu.

2. Dokumen/ arsip/ literatur/hasil penelitian sebelumnya.

Teknik ini merupakan cara pengumpulan dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yang merupakan sumber penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud berupa dokumen tertulis yang telah diperoleh dari media cetak dan media elektronik (internet), data statistik, laporan penelitian sebelumnya, tulisan-tulisan ilmiah yang juga merupakan dokumen penting yang telah ditelusuri untuk memperkaya data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini. Data tersebut berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara diatas.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis penelitian ini adalah kualitatif. Aplikasi penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial dilakukan dengan langkah-langkah yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian ini, mengumpulkan data lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini.

Analisis data dalam penelitian ini akan meliputi kegiatan dilakukan secara bertahap. Pada awalnya seluruh data yang didapatkan dikumpulkan baik yang berupa jawaban verbal dari narasumber maupun yang berupa tulisan atau data-data statistic dan hasil observasi/pengamatan. Selanjutnya dilakukan proses *reduksi data yakni* sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Peneliti melakukan transkrip data untuk

mengubah data hasil wawancara dan catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis.

Tahap selanjutnya dinamakan tahap *sajian data* yang merupakan penyusunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data, penulis dapat lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data diperoleh peneliti dari hasil interpretasi, usaha memahami dan analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi, dikategorisasikan antara satu sumber dengan sumber data yang lain. Sajian dapat dibuat dalam bentuk deskripsi matriks dan tabel. Semua data yang ada kemudian dirancang untuk menyampaikan informasi secara lebih sistematis mengenai kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pilgub 2013 Sulawesi Selatan Daerah pemilihan kabupaten Gowa. Proses kategorisasi terhadap data serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mencermati setiap fenomena politik yang berlangsung.

Semua data yang telah terhimpun tersebut kemudian dikomprasikan dengan konsep aktor yang dijadikan perangkat analisis dalam melihat bagaimana kekuatan politik serta menggunakan teori aktor untuk melihat kekuatan politik apa yang dimiliki Syahrul Yasin Limpo pada kemenangannya pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk mendapatkan realita di lapangan dengan menganalisis.

Tahapan terakhir adalah *penarikan kesimpulan* yang dimana suatu tahapan dimana penulis membuat penulisan pada saat pencarian data. Kesimpulan

tidak diproduksi sekali saja, tetapi berkali-kali selama masa penelitian berlangsung. Kesimpulan yang dihasilkan penulis dari hasil wawancara tidak selalu sama, bahkan ada yang bertentangan. Verifikasi data pun perlu terus dilakukan sampai kesimpulan yang diperoleh penulis benar-benar menjawab permasalahan dan penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Proses analisis data secara keseluruhan dimulai dengan menggelar seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan dan yang ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilah sesuai dengan kategori-kategori tertentu (tema atau topik) sehingga mendapatkan gambaran yang jelas. Selanjutnya mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada keaslian data. Hasil abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka pemikiran, konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan kemudian dideskripsikan, setelah itu baru diinterpretasikan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka bab IV akan menguraikan beberapa hal yang terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian diantaranya: Sejarah Singkat Kabupaten Gowa, Letak Geografis, Sumber Daya Manusia, serta Kondisi Politik dan Kondisi Pemerintahan Kabupaten Gowa.

A. Sejarah Singkat Kabupaten Gowa

1. Masa Sebelum Tumanurung (Kerajaan)

Sebelum zaman Tumanurung, ada empat raja yang pernah mengendalikan Pemerintahan Gowa yakni : Batara Guru, saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali (tak diketahui nama aslinya), Ratu Sapu atau Marancai dan Karaeng Katangka (Nama aslinya tak diketahui). Keempat raja tersebut tak diketahui asal-usulnya serta masa pemerintahannya. Tapi mungkin pada masa itu, Gowa purba terdiri dari 9 kasuwang (kasuwiyang salapang) mungkin pula lebih yang dikepalai seorang penguasa sebagai raja kecil. Setelah pemerintahan Karaeng katangka, maka sembilan kerajaan kecil bergabung dalam bentuk pemerintahan federasi yang diketuai oleh Paccalaya.

2. Masa Tumanurung (Kerajaan)

Berdasarkan hasil penelitian sejarah, baik melalui lontarak maupun cerita yang berkembang di masyarakat, dapat diketahui bahwa munculnya nama Gowa dimulai pada tahun 1320, yakni pada masa pemerintahan Raja Gowa pertama

bernama Tumanurunga. Konon, sebelum Tumanurunga hadir di Butta Gowa, ada sembilan negeri kecil yang kini lebih dikenal dengan istilah Kasuwang Salapanga yakni : Kasuwang Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling dan Se'ro. Kesembilan negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan federasi dibawa pengawasan Paccallaya (Ketua Dewan Pemisah).

Walaupun mereka bersatu, tetapi ke sembilan negeri tersebut sering dilanda perang saudara antara Gowa di bagian utara dan Gowa di bagian selatan. Paccallaya sebagai ketua federasi tak sanggup mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena Paccallaya hanya berfungsi sebagai lambang yang tidak memiliki pengaruh kuat terhadap anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom. Untuk mengatasi perang saudara tersebut, diperlukan seorang pemimpin yang kharismatik dan dapat diterima oleh kesembilan kelompok tersebut. Terdengarlah berita orang Paccallaya, bahwa ada seorang putri yang turun di atas bukit Tamalate tepatnya di Taka'bassia. Saat penantian, orang-orang yang berada di Bonto Biraeng melihat seberkas cahaya dari utara bergerak perlahan-lahan turun menuju Taka'bassia.

Kejadian itu cepat diketahui oleh Gallarang Mangasa dan bolo yang memang disertai tugas mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu kaum yang berseteru itu. Paccalaya bersama ke sembilan kasuwang bergegas ke Taka'bassia. Di sana mereka duduk mengelilingi cahaya sambil bertafakur. Cahaya itu kemudian menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita disertai pakaian kebesarannya antara lain berupa mahkota. Baik Paccalaya maupun Kasuwang tak

mengetahui nama putri tersebut, sehingga mereka sepakat memberi nama Tumanurung Bainea atau Tumanurung, artinya orang (wanita) yang tidak diketahui asal usulnya.

Karena putri ratu tersebut memiliki keajaiban, Paccalaya dan Kasuwiang Salapang sepakat untuk mengangkat Tumanurung sebagai rajanya. Paccalaya kemudian mendekati Tumanurunga seraya bersembah “Sombangku!” (Tuanku), kami datang semua ke hadapan sombangku, kiranya sombangku sudi menetap di negeri kami dan menjadi raja di negeri kami. Permohonan Paccalaya tersebut dikabulkan, dan berseru “Sombai Karaengnu tu Gowa (Sombalah rajamu hai orang Gowa). Baik Kasuwiang maupun warga yang ada di sekitar itu berseru “Sombangku”. Setelah Tumanurunga resmi menjadi Raja Gowa pertama pada tahun 1320 negeri Gowa kembali menjadi aman.

Masa pemerintahan Tumanurunga berlangsung sejak tahun 1320-1345. Diriwayatkan, Tumanurunga kemudian kawin dengan Karaeng Bayo, yaitu seorang pendatang yang tidak diketahui asal usulnya. Hanya dikatakan berasal dari arah selatan bersama temannya Lakipadada. Dari hasil perkawinan tersebut lahirlah Tumassalangga Baraya yang nantinya menggantikan ibunya menjadi raja Gowa kedua (1345-1370). Menjelang abad XVI, pada masa pemerintahan Raja Gowa VI, Tunatangka Lopi, membagi wilayahnya menjadi dua bagian terhadap dua orang putranya, yaitu Batara Gowa dan Karaeng Loe Ri Sero. Batara Gowa melanjutkan kekuasaan ayahnya yang meninggal dunia. Wilayahnya meliputi (1) Paccele kang, (2) Patalassang, (3) Bontomanai Ilau, (4) Bontomanai Iraya, (5) Tombolo, dan (6) Mangasa.

Adiknya Karaeng Loe ri Sero, mendirikan kerajaan baru yang bernama kerajaan Tallo dengan wilayah sebagai berikut: (1) Samata,(2) Pannampu, (3) Moncong Loe, dan (4) Parang Loe. Beberapa kurun waktu, kedua kerajaan itu terlibat pertikaian dan baru berakhir pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapakrisik Kallonna. Setelah melalui perang, beliau berhasil menaklukkan pemerintahan raja Tallo III I Mangayaoang Berang Karaeng Tunipasuru. Sejak itu, terbentuklah koalisi antara Kerajaan Gowa dan Tallo, dengan ditetapkannya bahwa Raja Tallo menjadi Karaeng Tumabbicara butta atau Mangkubumi (Perdana menteri) Kerajaan Gowa. Begitu eratnya hubungan kedua kerajaan ini sebagai kerajaan kembar, sehingga lahir pameo di kalangan rakyat Gowa dan Tallo dalam peribahasa “Dua Raja tapi hanya satu rakyat (Ruwa Karaeng Se’re Ata). Kesepakatan ini diperkuat oleh sebuah perjanjian yang dibuat dua kerajaan ini ,”iami anjo nasitalli’mo karaenga ri Gowa siangang karaenga ri Tallo, gallaranga iangaseng ribaruga nikelua. Ia iannamo tau ampasiewai Goa-Tallo, iamo macalla rewata”.

3. Masa Perkembangan Kerajaan Gowa

Pada permulaan abad ke-XVI kerajaan Gowa mengalami kemajuan di bidang Ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi bergelar “Tumapakrisik Kallonna”, dan dipindahkanlah Ibukota dari istana kerajaan dari Tamalate ke Somba Opu. Disana beliau membangun sebuah dermaga yang menjadikan Gowa sebagai Kerajaan Maritim yang terkenal di wilayah nusantara bahkan sampai ke luar negeri. Bandar

niaga Somba Opu dijadikan bandar transito sehingga ramai dikunjungi pedagang dari luar negeri.

Pada masa Karaeng Tumapakrisik Kallonna itu pula, Gowa telah berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menaklukkan berapa daerah di sekitarnya, seperti Garassi, Katingan, Mandalle, Parigi, Siang (Pangkajene), Sidenreng, Lempangan, Bulukumba, Selayar, Panaikang, Campaga, Marusu, Polongbangkeng (Takalar), dan lain-lain. selanjutnya Sanrobone, Jipang, Galesong, Agang Nionjok, Tanete (Barru), Kahu, dan Pakombong dijadikannya sebagai Palilik atau kerajaan taklukan Gowa tetapi masih diberi kesempatan memerintah. Mereka diwajibkan membayar sabbukati (bea perang) dan mengakui supremasi Kerajaan Gowa.

Pada masa Karaeng Tumapakrisik Kallonna ini pula, Gowa mulai dikenal sebagai bandar niaga yang ramai dikunjungi dan disinggahi oleh kapal-kapal untuk melakukan bongkar muat rempah-rempah. Setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, banyak pedagang dari negara asing yang berdatangan ke Makassar, termasuk orang Melayu pada tahun 1512, juga orang Portugis yang pertama datang ke Makassar (Gowa –Tallo) menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan pada tahun 1538. Orang Portugis inilah yang banyak mendapati kapal-kapal Makassar berkeliaran di sekeliling perairan Nusantara, bahkan sampai ke India, Siam (Muangthai) dan Filipina Selatan.

Memperkuat pertahanan dan kedudukan istana di Somba Opu, Karaeng Tumapakrisik Kallonna memerintahkan untuk membangun sebuah benteng dari gundukan tanah yang mengelilingi istana pada tahun 1525. Benteng tersebut

sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Somba Opu. Putra Karaeng Tumapakrisik Kallonna sebagai Raja Gowa X Karaeng Tunipallangga Ulaweng selanjutnya merenovasi benteng tersebut dengan tembok bata serta membangun benteng pertahanan lainnya, antara lain benteng Tallo, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Mariso, Panakukang, Garassi, Galesong, Barombong, Anak Gowa dan Kalegowa.

Setelah karaeng Tumapakrisik Kallonna wafat, beliau digantikan oleh puteranya I Manriogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) sebagai Raja Gowa X beserta mengkubuminya Nappakata`tana Daeng Padulung (Raja Tallo), melanjutkan cita-cita ayahandanya. Beliau memperkuat benteng-benteng pertahanan kerajaan dengan menjadikan Benteng somba Opu sebagai benteng utama. Politik ekspansinya berjalan dengan baik. Kerajaan yang tidak mau tunduk pada pengaruh Gowa dianggap sebagai saingan yang harus ditaklukkan. Oleh karena itu Ia menyerang Bone yang waktu itu di bawah kekuasaan Raja bone VII, La Tenrirawe Bongkange Matinro Ri Gucina.

Tonipallangga meninggal dunia, Ia digantikan oleh Tonibatta (1565) sebagai Raja Gowa XI. Nama lengkapnya adalah I Tajibarani Daeng Marompa, Karaeng Data, Tonibatta. Baginda adalah yang paling pendek masa jabatannya, yakni hanya 40 hari. Baru saja menduduki tampuk kekuasaan, ia langsung mengadakan ekspansi ke kerajaan Bone. Tonibatta tewas dalam keadaan tertetak sehingga digelar Tonibatta.

Jenazah Baginda dikembalikan ke Gowa diiringi pembesar-pembesar terkemuka kerajaan Bone. Beberapa saat setelah upacara berkabung selesai,

dilakukanlah perundingan perdamaian antara kedua kerajaan. Perjanjian itu biasa disebut *Ulukanaya ri Caleppa* (kesepakatan di *caleppa*). Setelah perundingan selesai, Raja Bone beserta penasehatnya *Kajaolalido* langsung ke Gowa mengikuti pelantikan Raja Gowa XII, *Manggorai Daeng Mammata Karaeng Bontolangkasa Tonijallo* (1565-1590).

Keadaan damai dimanfaatkan oleh kerajaan bone untuk menyusun aliansi *Tellunpocoe* atau “tiga puncak kerajaan Bugis” untuk menghadapi agresi Gowa. *Tonijallo* memandang aliansi ini sebagai ancaman langsung terhadap supremasi Gowa. Oleh karena itu, pada tahun 1583 ia melancarkan serangan terhadap *Wajo*. Tujuh tahun kemudian 1590, serangan dilanjutkan kembali tetapi Gowa tetap tidak mampu mengalahkan *Tellumpocoe*. *Tonijallo* sendiri tewas diamuk oleh pengikutnya.

Sepeninggal *Tonijallo*, ia digantikan oleh *I Tepu Karaeng Daeng Parambung Karaeng ri Bontolangkasa Tonipasulu* sebagai Raja Gowa XIII (1590-1593). Tidak banyak aktifitas yang dilakukannya sebab ia hanya memerintah selama tiga tahun, kemudian dipecat dari jabatannya. Pemecatan dilakukan karena banyak perbuatannya yang buruk, seperti pembunuhan dan pemecatan pejabat kerajaan secara semena-mena.

Pengganti *tonipasulu* adalah saudaranya *I Manggerangi Daeng Manrabia Sultan Alauddin Tu Menanga ri Gaukanna*, Raja Gowa ke-14, putra *Tunijallo*. Beliau dinobatkan ketika berumur 7 tahun. Oleh karena itu, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh *Mangkubumi/Raja Tallo-I* yang bernama *I Mallingkaang*

Daeng Manyonri` Karaeng Katangka, Karaeng Matoaya, Tumenanga Ri Agamana, Sultan Awwalul Islam.

B. Sumber Daya Manusia Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 652.329 orang, yang terdiri atas 320.568 laki-laki dan 331.761 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Gowa masih bertumpu di Kecamatan Somba Opu yakni sebesar 19,95 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Pallangga sebesar 15,08 persen, Kecamatan Bajeng sebesar 9,55 persen, Kecamatan Bontonompo sebesar 6,03 persen dan Kecamatan lainnya di bawah 5 persen. Parigi, Bontolempangan, dan Manuju adalah 3 Kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 13.100 orang, 13.212 orang, dan 14.074 orang. Sedangkan Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Pallangga merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya untuk wilayah di perkotaan, yakni masing-masing sebanyak 130.126 orang dan 98.372 orang. Dengan luas wilayah Kabupaten Gowa sekitar 1.883,33 kilo meter persegi yang didiami oleh 652.329 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah sebanyak 1.223 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Somba Opu yakni sebanyak 4.632 orang per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Paranloe yakni sebanyak 74 orang per kilo meter persegi.

C. Sosial Ekonomi Kabupaten Gowa

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu cerminan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu daerah, yang dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan di daerah itu. Selain itu dengan melihat peningkatan atau penurunan PDRB.

Pada tahun 2005 PDRB Kabupaten Gowa atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 2.123,28 milyar rupiah dan pada tahun 2006 naik menjadi sebesar 2.457,66 milyar rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2000 tercatat bahwa PDRB tahun 2005 sebesar 1.369,10 milyar rupiah meningkat menjadi 1.453,60 milyar rupiah pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 disamping ekonomi Kabupaten Gowa mengalami perkembangan sebesar 15,75 persen, secara riil ekonomi daerah ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Gowa (atas dasar harga berlaku) dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2003 angka PDRB perkapita daerah ini tercatat sebesar 2.861.266 rupiah dan pada tahun 2004 meningkat sebesar 12,82 persen menjadi 3.228.184 rupiah. Berdasarkan harga konstan tahun 2000 selama kurun waktu yang sama, PDRB perkapita Kabupaten Gowa juga terjadi sedikit kenaikan yaitu sebesar 65.460 rupiah, atau naik sebesar 2,95 persen. Bila dibandingkan dengan angka PDRB perkapita Sulawesi Selatan

yang mencapai 5,746 juta rupiah dan pertumbuhan 5,20 persen maka PDRB perkapita Kabupaten Gowa masih relatif rendah, baik dari sisi nilai maupun pertumbuhannya

C. Kondisi Politik Dan Pemerintahan Kabupaten Gowa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang perluasan Kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibukota Propinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa menyerahkan 2 (dua) Kecamatan yang ada di wilayahnya, yaitu Kecamatan Panakkukang dan sebagian Kecamatan Tamalate dan Desa Barombong Kecamatan Pallangga (seluruhnya 10 Desa) kepada Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang.

Terjadinya penyerahan sebagian wilayah tersebut, mengakibatkan makna samarnya jejak sejarah Gowa di masa lampau, terutama yang berkaitan dengan aspek kelautan pada daerah Barombong dan sekitarnya. Hal ini mengingatkan, Gowa justru pernah menjadi sebuah Kerajaan Maritim yang pernah jaya di Indoneia Bagian Timur, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 1971, maka praktis wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa mengalami perubahan yang sebelumnya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan dengan 56 Desa menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dengan 46 Desa.

Sebagai akibat dari perubahan itu pula, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa berupaya dan menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang didukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan membentuk 2 (dua) buah Kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Parangloe.

Guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masyarakat Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No.574/XI/1975 dibentuklah Kecamatan Bungaya hasil pemekaran Kecamatan Tompobulu. Berdasarkan PP No. 34 Tahun 1984, Kecamatan Bungaya di defenitifkan sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa menjadi 9 (sembilan).

Selanjutnya pada tahun 2006, jumlah kecamatan di Kabupaten Gowa telah menjadi 18 kecamatan akibat adanya pemekaran di beberapa kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan definitif pada tahun 2006 sebanyak 167 dan 726 dusun/lingkungan. Pada sejarah perkembangan pemerintahan dan pembangunan mulai dari zaman kerajaan sampai dengan era kemerdekaan dan reformasi, wilayah Pemerintah Kabupaten Gowa telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai daerah agraris yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah pengembangan perumahan dan permukiman selain Kota Makassar. Kondisi ini secara gradual menjadikan daerah Kabupaten Gowa yang dulunya sebagai daerah agraris sentra pengembangan pertanian dan tanaman pangan yang sangat potensial, juga menjadi sentra pelayanan jasa dan perekonomian.

D. Profil Syahrul Yasin Limpo

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah anak kedua dari pasangan H. Muh. Yasin Limpo dengan Hj. Nurhayati Yasin Limpo. Syahrul lahir di Ngawing, Makassar pada tanggal 15 Maret 1955. Syahrul Yasin Limpo saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, Syahrul Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Gowa selama dua periode, kemudian menjabat Wakil Gubernur selama satu periode mendampingi Amin Syam, sebelum akhirnya memenangkan pertarungan dengan Amin Syam dalam pilkada Sulsel di tahun 2008 setelah keduanya sama-sama maju bertarung sebagai calon *incumbent*.

Pada pilkada Sulawesi Selatan tahun 2008, Syahrul Yasin Limpo berpasangan dengan Agus Arifin Numang (saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Sulsel) yang merupakan salah satu pimpinan DPD Golkar Sulsel. Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara rival terberat Syahrul yaitu Amin Syam yang juga ketua DPD Golkar Sulsel di usung oleh koalisi Partai Golkar, Partai Kebangkitan bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat, ditambah sejumlah partai kecil lainnya. Setelah menjalani persaingan yang ketat, Syahrul Yasin Limpo akhirnya memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 bersama pasangannya, Agus Arifin Nu'mang.

Gubernur yang terkenal dengan *tagline* “Sayang” ini (Sayang merupakan singkatan dari Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang) ini mulai merealisasikan ide-idenya, antara lain pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Syahrul mengungkapkan bahwa hal dasar dalam mensejahterakan rakyat dan membuat suatu bangsa maju terletak dari tingkat pendidikan suatu rakyat atau bangsa dan hak dasar manusia sebenarnya adalah kesehatan, karena tidak akan makmur suatu bangsa bila kesehatannya tidak diperhatikan.

Atas dasar ini Syahrul Yasin Limpo berusaha mewujudkan ide ini, dan sekarang ini dapat dilihat, pendidikan gratis telah direalisasikan di kabupaten Gowa dan daerah lainnya sampai tingkat SMA. Dibiidang kesehatan, rumah sakit yang ditunjuk pemerintah menggratiskan biaya kesehatan yakni melayani pasien dengan hanya menerima pembayaran fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

Pasangan Syahrul Yasin Limpo - Agus Arifin Nu'mang yang mencalonkan diri untuk menjadi calon *incumbent* gubernur dan wakil gubernur periode 2013-2018 beberapa waktu lalu mampu mempertahankan posisinya dengan memperoleh kemenangan untuk kali kedua. Pasangan yang dikenal dengan *tagline* “Sayang Jilid II” di Kabupaten Gowa terlihat mendapatkan dukungan begitu signifikan menyisihkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Azis Kahar Mudzakkar (IA) dan A. Rudiyanto Asapa-Nawir Pasinringi (Garuda-Na).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menjelaskan temuan penelitian tentang kekuatan politik apa saja yang menjadi faktor pendukung kemenangan Syahrul Yasin Limpo pada pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa, serta bagaimana kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo sebagai aktor politik pada pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini.

Miriam Budiarto Mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian Individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan di sini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Adapun indikator utama tersebut dapat memenangkan Pemilu adalah dengan memiliki, modal sosial, modal kultural/budaya dan modal simbolik atau dengan sederhana dapat dikatakan, figur atau aktor politik tersebut menduduki posisi strategis dalam pemerintahan dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada di daerah.

Kekuatan politik di Indonesia telah memberikan kontribusi membangun dan memberikan corak pada sistem politik Indonesia. Dalam perkembangan

sistem politik, telah banyak bermunculan aktor maupun lembaga yang menjadi kekuatan politik Indonesia. Aktor maupun lembaga yang menjelma menjadi kekuatan politik tidak lain merupakan tonggak perjuangan bagi pembangunan politik di Indonesia.

A. Kekuatan Politik Yang Mendukung Kemenangan Syahrul Yasin Limpo Pada Pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa.

Pada pemilukada, dukungan sebagian besar masyarakat kepada calon atau kontestan tidak selalu mutlak karena faktor calon tersebut didukung oleh Partai walaupun sebahagian lainnya partai pengusung dianggap punya pengaruh sebagai mesin politik. Secara statistik kiprah majunya para *incumbent* dalam pemilukada di berbagai daerah secara umum menunjukkan bahwa para *incumbent* akan lebih mudah memenangkan pemilukada namun, figur calon juga berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Di era pemilihan langsung, populer dan elektabilitas memang menjadi bagian penting untuk terpilih menjadi kepala daerah. Kemenangan dalam Pemilukada, sangat bergantung pada kemampuan atau kekuatan politik calon yang diusung.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang menerapkan sistem demokrasi turut juga mengalami dinamika politik dalam pemilihan gubernur. Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013 dan sebagai gubernur *incumbent* terpilih periode 2013-2018 menguatkan posisinya tersebut dirinya mengelola kekuatan-kekuatan politiknya di daerah.

Jika dirincikan, maka jenis-jenis kekuatan politik ada delapan, yakni: partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, aktor politik, media massa, organisasi keagamaan, birokrasi sipil dan militer. Kesemua jenis kekuatan politik tersebut sudah pernah mengisi sistem politik di Indonesia. Namun yang perlu digaris bawahi pada pembahasan ini penulis membatasinya pada faktor pendukung kemenangannya yang dominan yakni birokrasi dan sipil dan partai politik.

Penulis membatasi jenis kekuatan politik tersebut hanya beberapa saja yang kemudian dipahami dalam skripsi ini merupakan acuan terhadap seorang kandidat mendapatkan dukungan dari salah satu daerah pilihannya. Partai politik sebagai partai pengusungnya, birokrasi maupun hubungan emosional yang terbangun ditengah masyarakat lokal. Inilah merupakan modal awal yang kemudian diakomodir sedemikian rupa secara berkelanjutan agar masyarakat untuk memilih sang kandidat.

1. Birokrasi

Bagian yang lain dari kekuatan politik partai politik adalah birokrasi yang memang memiliki akar sejarah yang tidak pernah terlepas dari pengaruh politik praktis. Sejarah birokrasi mencatat bahwa kedudukan birokrasi terhadap sistem politik lokal dalam kasus ini pun juga terjadi di dalam Pemilukada Sulsel 2013 di kabupaten Gowa. Penguasaan politik jaringan pemerintahan lebih terfokus pada pengkondisian birokrasi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Gowa. Karena pengaruh *incumbent* dari pasangan “SAYANG” kuat, sehingga bisa mengkondisikan birokrat dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gowa dari

level tingkat kabupaten sampai tingkat RT (Rukun Tetangga) untuk mendukung pasangan ini.

Secara garis besar dalam pemiluakada, *incumbent* mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mengimplementasikan strategi kampanyenya dalam rangka proses pemenangan pemiluakada karena *incumbent* memiliki beberapa keuntungan, yakni menguasai akses sosial terhadap sipil. Penguasaan terhadap akses sosial ataupun loyalis ini sangat penting karena akan mendongkrak elektabilitas kandidat guna meraih dan mempertahankan kekuasaan.

Seperti yang di ungkapkan masyarakat Gowa Dg. Ngalle, bahwa :

“Beliau itukan sebagai pemerintah ya kita ikut dengan pemerintah tidak ada untungnya melawan bagi kita ini masyarakat kecil. Saya ada 4 organisasi pertama brigade 02, anggota koperasi appakabaji’, dan Kosgoro. Sempat juga ada beberapa masalah waktu proses pemilihan Gubernur yang lalu, atasan kami pak Ichsan disini arahkan kami ke Makassar untuk adakan penyerangan tapi pak Gubernur tahan kita. Kalo bukan ini beliau tidak ada lagi bisa ikuti, jangankan mesjid, fasilitas umum untuk masyarakat di Gowa tak ada satupun terealisasi. Andi ijo karaeng lolang raja Gowa jadi bupati pertama di Gowa apa buktinya, satu-satunya pak Syahrul dan akhirnya adiknya juga majukan Gowa seperti Syech Yusuf Discovery, Lapangan Golf, jadi kalo ada orang yang menjelekan pak bupati dan pak Gubernur orang sakit hati itu.”

Berdasarkan wawancara tersebut hal ini berkaitan dengan kontribusi Syahrul Yasin Limpo membangun kabupaten Gowa dimana Syahrul merintis karirnya dari bawah. Informan juga menuturkan apa yang menjadi kemajuan di Gowa ini karena peran besar dari program-program Syahrul Yasin Limpo yang pernah menjabat bupati dua periode. Pribadi yang bijak dan estafet pemerintahan yang dijabat adiknya Ichsan Yasin Limpo yang juga sekarang sudah menjabat periode keduanya. Adapun masalah yang timbul dalam gejolak Pemiluakada yang

lalu itu merupakan hal yang lumrah dalam proses demokrasi yang dinamis. Birokrasi yang menjadi kekuatan politiknya di daerah yang turut serta diakomodasi secara tidak langsung Ichsan YL menunjukkan ada pola yang terstruktur dari awal yakni bagaimana membawa kemajuan itu sendiri di Kab. Gowa, ditambah lagi keberadaan loyalis dari kalangan sipil atau tokoh - tokoh masyarakat yang sebagian besar dihuni oleh organisasi sayap partai Golkar.

Berbagai pemilihan kepala daerah, posisi *incumbent* selalu memiliki keuntungan ganda. Pertama, seorang *incumbent* sudah jelas berbagai kebijakan yang telah teruji dan dirasakan langsung. Seorang *incumbent* mempunyai modal sosial karena selain pemangku kebijakan dia adalah sosok yang paling dikenal masyarakat lokal karena pernah memimpin daerah yang juga menjadi salah satu daerah pemilihan. Orang mengenalnya dengan prestasi-prestasi, meski ada beberapa orang belum pernah melihat rupanya. Artinya, bukan lagi masalah dan itu berarti memperkecil ruang sosialisasi personal yang lebih besar. Meskipun dilakukan, itu hanya untuk memperbesar tingkat keterpilihannya di masyarakat. Hal ini jelas berbeda dengan kandidat yang lainnya, sebab untuk membuat dirinya dikenal masyarakat, maka dirinya mau tidak mau harus melakukan sosialisasi personal yang besar dan intens.

Kondisi kedua, yakni sang *incumbent* pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah, dan seorang penentu kebijakan. Masyarakat akan mengenalnya sebagai seorang yang pernah berbuat untuk kepentingan masyarakat, meski soal berbuat untuk kepentingan masyarakat ini masih bisa diperdebatkan. Namun setidaknya, selama masa kepemimpinannya berbagai

kebijakan dan program telah diimplementasikan. Dan tentu hal ini menjadi catatan bagi masyarakat tentang diri seorang *incumbent* terutama seberapa besar kebijakan dan program yang diimplementasikannya tersebut terhadap perkembangan masyarakat.

Kemudian kondisi ketiga, dari seorang *incumbent* biasanya memiliki sumber daya yang cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinannya selama ini. *Incumbent* juga memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal dan menjadi modal sosialnya. Karena itu, tidaklah terlalu sulit bagi seorang *incumbent* untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.

2. Partai politik

Syahrul Yasin Limpo bersama Agus Arifin Nu'mang (SAYANG) pada pemilihan ini diusung Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS).

Partai Golkar Kab. Gowa sebagai partai penguasa masih dianggap pembawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal dan juga figur kadernya sebagai putra asli daerah. Pemilukada Sulsel yang baru saja diadakan adalah bukti keseriusan dalam mempersiapkan strategi kemenangan Syahrul Yasin Limpo di Kab. Gowa. Partai Golkar dihuni banyak tokoh tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh pada tingkatan terbawah.

Hal ini diungkapkan oleh Ramli, salah satu kader partai Golkar kab. Gowa,

“Tidak sulit menjelaskan posisi partai Golkar di kab. Gowa banyak hal yang jelas menjadi keunggulan, partai ini sudah mengakar rumput dikalangan masyarakat. Ada beberapa organisasi sayap kami yang menopang perjuangan dalam memenangkan pak Syahrul antara lain seperti AMPG, Brigade 02 dan lembaga dakwah islam.

Berdasarkan pemahaman informan tersebut, posisi Syahrul sebagai ketua DPD 1 Sulsel memiliki persiapan yang cukup mumpuni yakni mesin politiknya partai Golkar yang banyak dihuni tokoh masyarakat. Adapun partai lain yang mendukung atau berkoalisi dengan partai Golkar banyak juga dari kalangan tokoh masyarakat.

Partai Politik dan birokrasi merupakan bagian dari kekuatan politik yang memiliki potensi dalam hal ini kontestasi Pemilu yang di optimalkan aktor politik. Aktor politik ini adalah sosok yang dicita-citakan dan mempunyai kekuasaan dan sebagai seorang kandidat dia adalah *incumbent* yang memiliki kelebihan lebih dibandingkan kandidat yang lain, yakni mereka memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik tentu akan diingat dan disukai oleh pemilihnya. Namun disisi lain tidak memberikan perspektif politik baru, mengingat masyarakat Kabupaten Gowa sudah faham betul akan reputasi, latar belakang, kualitas, kapasitas, dan tingkat elektabilitasnya seorang Syahrul Yasin Limpo yang juga pernah menjabat bupati Kabupaten Gowa 2 periode.

Dari hasil wawancara yang sudah disimpulkan dari beberapa narasumber dan beberapa opini masyarakat yang berkembang di Kabupaten Gowa sebagai daerah kemenangan bahwa Syahrul Yasin Limpo mampu mengoptimalkan

kekuatan politiknya, pengamatan dilapangan dan realita sosial yang ada memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, namun ketika berbicara perilaku seseorang, hal tersebut menjadi serba belum pasti, Karena sifatnya dapat berubah-ubah dalam rentan waktu sekejap.

B. Kekuatan Politik Syahrul Yasin Limpo Sebagai Aktor Politik Pada Pemilihan Gubernur 2013 di Kabupaten Gowa.

Aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor. Aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*). Mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.

Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Disini peran aktor adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan aktor dan bukan kepentingan publik. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang, terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.

1. Posisi sebagai Gubernur/Incumbent.

Posisinya sebagai gubernur mempunyai kelebihan sendiri yakni memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memanfaatkan kedudukan menjangkau lapisan - lapisan masyarakat. Modal sosial Syahrul Yasin Limpo inilah yang mampu menunjangnya selain berpengalaman dalam pemerintahan dan dalam proses kemenangannya Syahrul Yasin Limpo dianggap juga oleh masyarakat Kabupaten Gowa sebagai representasi etnis makassar. Kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2013 dan kemenangan untuk periode kedua gubernur periode 2013-2018 mempunyai kelebihan sendiri menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Gowa. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan berbagai macam pandangan, pemahaman serta karakteristik yang berbeda-beda masyarakat tentang kekuatan politik dan faktor kemenangan Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Gowa pada pemilihan gubernur tahun 2013.

Posisi Syahrul Yasin Limpo selaku gubernur Sulawesi Selatan merupakan suatu kekuatan yang dimiliki dalam strategi politiknya, bahwa dengan posisi yang dimilikinya, Syahrul Yasin Limpo menjalankan peran sebagai seorang aktor politik dengan modal sosial ditunjang modal ekonomi yang dimiliki sedemikian rupa, sehingga terjadi hubungan atau relasi sehingga menjadi sesuai dengan keinginan aktor secara individu yang mempunyai kekuasaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Andi Nurdin S.Pd, salah satu tokoh pemuda Kab Gowa,

“Pertama itu karena pak Syahrul incumbent dan Sebagai gubernur tentu dia punya program program yang telah teruji dan rasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, kemudian di kab. Gowa sendiri dia

programnya itu menjadi pondasi dari apa yang telah dijalankan sekarang di kab. Gowa yakni pendidikan dan kesehatan gratis, jadi menurut saya ini yang menjadi nilai tambah pak Syahrul di Kab. Gowa.”

Berdasarkan pemahaman informan tersebut diatas, posisi Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur/incumbent sangat mendukung kemenangannya dan menjadi modal sosial melalui program kerja pada awal periode pada Pemilihan Gubernur (Pilgub). Faktor tersebut sejalan dengan dukungan partai politik.

2. Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan.

Syahrul Yasin Limpo selain menjabat Gubernur Sulawesi Selatan juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Ini adalah modal simbolik, dimana ini mencakup status, otoritas dan legitimasi. Partai Golkar merupakan partai politik dan merupakan salah satu dari 10 partai politik peserta pemilu 2014, mempunyai banyak dewan perwakilan di Indonesia sampai pada daerah salah satunya di Sulawesi Selatan. Dibandingkan partai politik peserta lainnya, elektabilitas Partai Golkar cenderung stabil mendekati Pemilu Legislatif 2014 yakni 17,1 %¹⁹.

Partai Golkar di kabupaten Gowa merupakan mesin suara yang di anggap paling berpotensi memenangkan Pemilukada. Partai penguasa sejak masa pemerintahan Soeharto ini sangat di agung-agungkan apalagi di pelosok desa-desa, dimana mereka menganggap partai ini adalah partai pemerintah yang dapat membawa pemerintahan daerah mereka ke arah yang lebih baik, seperti pada masa pemerintahan Soeharto.

¹⁹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/02/survei-fsi-elektabilitas-golkar-stabil-melebihi-aburizal> diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 10:45 wita

Seperti yang diungkapkan tokoh partai Golkar Gowa Kamaruddin Timung bahwa :

“Keberadaan partai golkar sendiri di kab. Gowa bagi saya dan umumnya masyarakat disini antusias rasa simpatiknya karena dulu dijamannya pak Harto begitu sejahtera, sembako murah, dan aman ditambah beberapa kader PDK yang merapat ke partai Golkar makin menunjukkan besarnya dukungan suara yang digalang oleh partai golkar di kabupaten Gowa.”

Berdasarkan wawancara diatas terungkap bahwa apa yang telah dicapai partai Golkar dimasa lalu secara berkelanjutan berdampak positif dengan keberadaannya ditengah kontestasi Pemiluakda dan masyarakat kabupaten Gowa saat sekarang ini menilainya sebagai pembawa kesejahteraan. Apalagi PDK yang dihuni tokoh – tokoh berpengaruh di kabupaten Gowa sudah tidak masuk lagi jajaran partai politik 2014 sebagian besar merapat ke partai Golkar.

3. Cerdas, berpengalaman dan dianggap Representasi etnis lokal

Makassar

Modal kultural Syahrul Yasin Limpo ini selaku aktor politik memiliki kemampuan yang luar biasa dalam hal memimpin seseorang/pengikutnya. Diantaranya berbagai pengalamannya di pemerintahan Syahrul Yasin Limpo yang pernah memimpin Kabupaten Gowa selama 9 tahun dianggap sebagai sebagai sosok ideal sebagai pemimpin. Kepatuhan seorang bawahan timbul dari kepercayaan penuh kepada beliau. Dapat dikatakan Syahrul Yasin Limpo mempunyai kemampuan luar biasa diluar kemampuan orang-orang biasa, sebagai pejabat politik memiliki kelebihan sifat kepribadian mempengaruhi pikiran, dan tingkah laku orang lain, karena dipandang sebagai aktor yang istimewa karena sifatnya yang berwibawa. Kepribadiannya diterima dan dipercayai sebagai orang

yang dihormati, disegani, dipatuhi dan ditaati secara rela dan ikhlas. Mampu menggerakkan atribut sekelilingnya dalam menjalankan manajemennya.

Aspek-aspek perilaku yang muncul sebagai konsekuensi dari sosoknya sebagai gubernur, mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi dan menyiasi perubahan-perubahan yang terjadi. Sehingga dapat dikategorikan sebagai seorang aktor politik yang mampu berjiwa demokratis dalam memimpin Sulawesi Selatan dan dengan apa yang telah dicapainya pada periode yang lalu pada 22 Januari 2013 Syahrul Yasin Limpo sebagai representasi orang Makassar kembali terpilih untuk masa bakti 2013-2018. Hal ini senada dengan dengan diutarakan informan Muhammad Said, salah satu tokoh masyarakat Gowa.

“Pak Syahrul itu orang asli Makassar itu dan rakyat, dan dengan pengalamannya dalam birokrasi membawa masyarakat ke arah yang lebih baik contohnya itu pendidikan dan kesehatan gratisnya bahwa dia memperhatikan masyarakat secara umum, tidak ada diskriminasi dia adalah pemimpin ideal. Itu yang kita harapkan.”

Berdasarkan pemahaman informan tersebut, Syahrul Yasin Limpo dinilai sangat bersahaja bagi masyarakat kabupaten Gowa, dekat dan berbaur dengan masyarakat kalangan manapun, mampu membangun komunikasi secara harmonis dengan berbagai komponen masyarakat. Sosok Syahrul Yasin Limpo merupakan sosok pemimpin yang memiliki jiwa demokratis yang tercermin dari sifat *responsive leader* yang menjadikan masyarakat sebagai tumpuan dalam kepemimpinan politiknya.

Kekuasaan Syahrul Yasin Limpo selaku pejabat politik merupakan suatu kekuatan yang dimilikinya dalam strategi politiknya, bahwa dengan kekuasaan yang dimiliki individu aktor politik mampu mempengaruhi perilaku aktor secara

kolektif sedemikian rupa, sehingga terjadi hubungan antar aktor sehingga menjadi sesuai dengan keinginan aktor individu yang mempunyai kekuasaan. Karenanya kekuasaan selalu terkait dengan konteks sosial, interaksi dan konfigurasi sosial dan politik yang menyertainya sangat penting, jadi dapat dikatakan bahwa sebenarnya semua relasi sosial adalah relasi kekuasaan. Keberadaan Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Kabupaten Gowa dan juga ketua partai Golkar Gowa Hj. Tenri Olle Yasin Limpo sangat mendukung kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Gowa. Hal ini diungkapkan oleh Ansar Usman selaku koordinator tim kemenangan “sayang” di Kabupaten Gowa.

“Sejauh ini, Tenri Olle Yasin Limpo sebagai ketua Golkar di Kabupaten Gowa, dia berperan dalam rekrutmen tim kemenangan sampai pada tingkat desa dan kelurahan. Dimana-mana ia sebutkan bahwa tim kemenangan dan kader partai wajib memenangkan SYL.”

Berdasarkan pemahaman informan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Kabupaten Gowa dan juga ketua partai Golkar Gowa Hj. Tenri Olle Yasin Limpo mempunyai pengaruh yang cukup signifikan untuk mendukung kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo di kabupaten Gowa. Adanya pengaruh tersebut pada kekuatan politik Syahrul Yasin Limpo selaku gubernur dan ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan menurut modal politik yang dipakai oleh penulis dapat dikategorikan bahwa masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seorang pemimpin atau aktor politik dapat membentuk pengaruh terhadap kepribadian serta tindakan – tindakan perilaku politik

masyarakat, termasuk jajaran bawahan Syahrul Yasin Limpo (Ichsan Yasin Limpo dalam hal ini bertindak sebagai jajaran bawahan Syahrul Yasin Limpo).

4. Ketokohan atau kharisma pribadi

Sebagai bagian modal simbolik ketokohan atau kharisma pribadi Syahrul Yasin Limpo dengan apa yang telah dicapai Figurnya yang menjadi calon kepala daerah juga sangat menentukan dalam sebuah pelaksanaan Pemilu. Pada pemilu, sebagian besar rakyat memilih bukan karena faktor calon tersebut didukung oleh Partai. Namun, kepopuleran dan figur calon juga berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah, juga bergantung pada ketokohan calon yang diusung. Jika calon yang diusung memiliki kharisma dan diakui ketokohnya, maka kemungkinan menang akan sangat besar karena disukai dan diinginkan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan salah satu masyarakat Gowa, Umar Dg. Lau' bahwa :

“Saya sudah kenal 20 tahun dengan bapak bisa dibilang dia itu orangnya baik dan bijaksana, beda dengan adiknya pak ichsan di sini orangnya cenderung lebih keras. Oleh pak Syahrul yang juga membawahi kami di brigade 02 Sulawesi Selatan selalu dihibau lebih bijak dalam menanggapi tiap permasalahan”

Pernyataan informan tersebut dapat dikatakan bahwa posisinya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo memiliki daya tarik lebih karena pengalaman juga kepribadiannya. Bentuk otoritas kharismanya merujuk pada sebuah kualitas yang melekat pada kepribadian aktor, dan kelebihan yang dimilikinya dipandang tidak dapat diakses oleh orang biasa, walaupun Syahrul

Yasin Limpo istimewa dimata masyarakat karena jabatannya sebagai seorang gubernur.

Berdasarkan pernyataan informan diatas dinyatakan bahwa apa yang menjadi keunggulannya ialah kemampuannya mengaktualisasi pribadinya sebagai sosok yang mempunyai pengaruh besar, baik dalam struktur pemerintahan maupun figurnya sebagai putra daerah. Partai Golkar mempunyai akses cukup luas ke desa-desa karena pemilih itu sebagian besar berasal dari desa. Walau dalam beberapa realita dilapangan yang ditemui penulis bahwa umumnya masyarakat mengenal karena calon ini figur terkenal apalagi keberadaan partai Golkar di Kabupaten Gowa cukup mayoritas.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil setelah melakukan penelitian dan menguraikannya dalam bab pembahasan. Selain kesimpulan, penulis juga menawarkan beberapa saran serta kelemahan dalam menghadapi fenomena yang sama dengan judul penelitian yaitu **“Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) Pada Pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa”**.

A. Kesimpulan

1. Otonomi daerah sebagai gerbang pemerintahan baru era reformasi memiliki agenda besar dalam menciptakan kesejahteraan dan pembangunan rakyat. Salah satunya adalah pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dalam rangka mengimplementasikan demokrasi yang substantif di dalam bidang pemerintahan. Salah satu cara mempercepat pembangunan adalah memaksimalkan peran birokrasi di tingkat daerah melalui pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.

Namun dalam perjalanannya birokrasi saat ini masih terikat dengan budaya birokrasi masa lalu yang sangat patrimonial dan otoritarian. Kondisi tersebut diperparah dengan rendahnya kedewasaan berperilaku kalangan birokrat dalam menyikapi potensi otonomi daerah. Muncul pragmatisme kekuasaan dikalangan birokrat dalam memanfaatkan potensi otonomi daerah, dalam rangka mencapai

kepentingan pribadi. Akibatnya birokrasi kehilangan peran fungsional pelayanan publik dan bertransformasi menjadi alat politik kekuasaan.

Hubungan birokrasi dan politik kekuasaan memang bukan hal baru di Indonesia, hal ini telah terjadi sejak masa pemerintahan sebelum era reformasi 1998. Penggunaan birokrasi sebagai alat politik kekuasaan telah menghegemoni dan sangat terlihat dalam praktek pilkada. Dibeberapa kasus pilkada, telah terjadi penyimpangan birokrasi oleh incumbent demi kepentingan politik. Dan hal tersebut menjadikan birokrasi sebagai arena politik yang sesungguhnya, karena ada tawar menawar politik antara politisi, *incumbent* dan birokrat dalam satu arena yaitu birokrasi.

2. Aktor politik merupakan pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang berpengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa memberikan pengaruh adalah selalu merupakan yang terbaik. Mereka yang dikenal sebagai aktor. Aktor merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat, atau dukungan politik dari masyarakat. Berdasarkan informasi yang penulis butuhkan, diantaranya penulis banyak mengambil data melalui wawancara terhadap informan dan melihat fenomena yang ada di masyarakat menunjukkan masih besarnya pengaruh terhadap figur dari seorang kandidat dalam proses kemenangan

Syahrul Yasin Limpo di kabupaten Gowa. Mayoritas masyarakat masih menganggapnya sosok ideal pembawa kesejahteraan walau ada beberapa tuduhan miring mengenai politik dinasti Yasin Limpo setelah pemilihan bupati untuk periode kedua Ichsan Yasin Limpo oleh beberapa rivalnya, nampaknya tidak berpengaruh besar dengan perolehan suaranya pada pemilihan Gubernur di kabupaten Gowa. Ada empat faktor yang mendukung kekuatan politik lokal Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Gowa, yaitu:

- a. Posisi sebagai Gubernur/Petahana
- b. Ketua DPD 1 Golkar SulSel
- c. Cerdas, berpengalaman dan dianggap Representasi etnis lokal Makassar
- d. Ketokohan atau kharisma pribadi

Dari keempat faktor tersebut, yang paling dominan adalah posisi Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur. Syahrul Yasin Limpo bukan hanya menjabat sebagai gubernur, tetapi juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Reputasi yang telah dimiliki oleh SYL semakin menggambarkan kepada kita betapa sosok guberbur Sulawesi selatan ini punya kapasitas, kekuatan politik, prestasi, dan karakter tersendiri dan telah menjelma menjadi sosok yang tidak hanya diperhitungkan di Sulawesi selatan, tetapi juga di pentas nasional.

B. Saran

1. Objek yang diteliti dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam skripsi ini adalah manusia. Sifat objek penelitian manusia yang bersifat elastis atau berubah-ubah, maka penelitian mengenai popularitas seorang figur atau aktor politik tidak sampai disini, artinya penelitian mengenai kekuatan politik lokal ini haruslah berkelanjutan. Karena setiap waktu, lingkungan dan kondisi psikis masyarakat tidaklah selalu tetap. Maka penelitian seperti ini haruslah diteliti atau diuji kebenarannya secara berkala dan berkelanjutan.
2. Masyarakat seharusnya bersikap pluralis, sehingga tercipta dan terbina harmoni kehidupan masyarakat yang multikultural dan mendorong terwujudnya tatanan nilai kearifan yang berorientasi lokal dan sesuai dengan cita-cita demokratisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Abdulkahar, Badjuri. (2007). *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategis*, Semarang: Universitas Diponegro Press.
- Agusyanto, Rudi. (2007). *Jaringan Sosial Dalam Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsini. (2006 Edisi Revisi VI). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrain, Charles F. *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1992.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Onong Uchjana. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Mandra Maju. 1992.
- Hayati, Sri., dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*. Bandung: Refika Aditama. 2007
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Mulyana, Dedy. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marijan, Kacung Marijan (2006). *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung*. Pustaka Eureka, Surabaya: Pustaka Eureka.
- Maran, Rafael.Raga.(2007). *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Romli, Lili, Taftazani. *Demokrasi Lokal dan Pilkada*. Jurnal Demokrasi dan HAM. 2006.
- Rudini, H. *Atas Nama Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing. 1994.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sanit, Arbi. *Reformasi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Siagian, Sondang P. *Peranan Staf Dalam Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung. 1985.

Supriyanto. *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Pustaka Mina. 2008.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. 1992.

Sy, Pahmi. *Politik Pencitraan*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Upe, Ambo. *Sosiologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Prestasi Pustakarya. 2008.

Sumber dari internet :

Anthonius sitepu. Tranformasi Kekuatan – Kekuatan Politik Suatu Studi Teori Kelompok Dalam Konfigurasi Politik Sistem politik Indonesia. PDF Diakses pada 31 Mei 2013.

[Http://dontstopkomandan.blogspot.com/2011/12/syl-gubernur-terbaik-indonesia-2012.html](http://dontstopkomandan.blogspot.com/2011/12/syl-gubernur-terbaik-indonesia-2012.html) . Diakses pada tanggal 26 januari 2013 pukul 20.30 Wita

[Http://politik.kompasiana.com/politik-lokal-di-indonesia-dari-otokratik-ke-reformasi-politik](http://politik.kompasiana.com/politik-lokal-di-indonesia-dari-otokratik-ke-reformasi-politik). Diakses pada 12 Mei 2013

[Http://madiyahawarman.blogspot.com/2010/09/politik-birokrasi-di-era-otonomi-daerah.html](http://madiyahawarman.blogspot.com/2010/09/politik-birokrasi-di-era-otonomi-daerah.html). Diakses pada 28 April 2014

Hanta Yuda AR, Penyimpangan Partai Politik, dikutip di hal web <http://nasional.kompas.com/read/2010/06/28/08244331/Pyenyimpangan.Partai.Politik>. Diakses pada 18 Mei 2013

[Http://www.tribunnews.com/2013/02/01/ini-hasil-lengkap-pilgub-sulsel](http://www.tribunnews.com/2013/02/01/ini-hasil-lengkap-pilgub-sulsel) diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

[Http://mediaindonesia.com/artikel: M Alfian Alfian M//Perubahan Politik dan Reformasi Militer//](http://mediaindonesia.com/artikel/M-Alfan-Alfian-M-Perubahan-Politik-dan-Reformasi-Militer/). Diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

Tempo Jakarta, “Politik Dinasti Dalam Pilkada Masih Mungkin Dipraktikkan” dikutip di halaman web http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1053:dinasti-politik-masih-kental&catid=12:refleksi&Itemid=82. Diakses pada 29 Mei 2013.

Suara Pembaruan Jakarta, “Hasil Rekap KPU Syahrul Unggul di 14 Daerah”
dikutip di halaman web <http://www.suarapembaruan.com/home/hasil-rekap-kpu-syahrul-unggul-di-14-daerah/29803>. Diakses pada 29 Mei 2013.